

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang paling kompleks yang dihadapi berbagai negara di dunia khususnya negara sedang berkembang seperti halnya Indonesia. Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia karena dengan adanya masyarakat yang miskin dan tidak memiliki pekerjaan berarti masyarakat tidak mampu menciptakan kesejahteraannya sendiri yang berarti juga upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya tidak merata atau tidak terlalu berpengaruh, sehingga kemiskinan dan pengangguran menjadi fokus perhatian bagi Pemerintah Indonesia. Kemiskinan kerap dihubungkan dengan pembangunan yang diupayakan oleh Pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Masyarakat diseluruh dunia mendambakan pembangunan yang adil dan merata. Oleh sebab itu setiap negara selalu berupaya untuk memberikan dan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan meningkatkan infrastruktur.

Upaya mencapai kesejahteraan, berarti haruslah hasil pembangunan seperti pembangunan infrastruktur pedesaan atau pembangunan dalam bidang ekonomi dan sumber daya manusia dapat merata diterima seluruh pelosok tanah air, khususnya dapat menjangkau ke lapisan paling bawah. Pembangunan memiliki perbedaan definisi dan pendapat dalam pengertiannya. Menurut Tjokroamidjojo (1994), "Pembangunan pada pokoknya adalah suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik". Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan yang baik perlu adanya sarana dan prasarana atau infrastruktur yang memadai dan mendukung seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat dan canggih. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat, serta media. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha pembangunan proyek dan sebagainya), (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan

Bahasa, 1989). Oleh sebab itu, infrastruktur merupakan salah satu komponen terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adanya infrastruktur yang memadai akan menunjang kegiatan dan pekerjaan manusia yang berat menjadi lebih ringan.

Fasilitas umum atau infrastruktur yang ada tidak terlalu diperhatikan secara serius keberadaannya. Secara sepiantas dampak tersebut belum terlalu dirasakan, namun dalam jangka waktu kedepan akan mengakibatkan beberapa jenis gangguan yang dirasakan oleh masyarakat terkait. Beberapa gangguan yang terlihat adalah gangguan fisik seperti kerusakan jembatan, jalan yang berlubang, dan saluran drainase yang tidak memenuhi standar kesehatan.

Selama ini, banyak program pembangunan dari pemerintah yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi kemiskinan seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin, Kompensasi BBM, dan lain-lain. Namun, dari program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya dan belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia serta dinilai kurang efektif, karena masyarakat hanya menerima bantuan langsung dan tidak berpartisipasi secara langsung dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kondisi kehidupan mereka sendiri. Bank Dunia (*World Bank*) mencatat, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 49,5% jika diukur dari pendapatan perkapita US \$ 2 per hari. Sementara pemerintah Indonesia yang merujuk pada data BPS, menyebutkan, jumlah orang miskin tahun 1998 adalah 79,8 juta jiwa, yang secara bertahap sempat menurun pada tahun 2003-2005. Ketika harga BBM naik 100% pada 1 Oktober 2005 kembali menaikkan jumlah orang miskin sebesar 39,30 juta jiwa (17,75%) pada Maret 2006, padahal Februari 2005 hanya 35,1 jiwa. Sedangkan pada tahun 2007 terjadi penurunan ke angka 37,17 juta jiwa (Berita Indonesia, 28/12/2007).

Keberadaan pihak lain dalam pembangunan infrastruktur yaitu pemerintah sangat berpengaruh dalam kelancaran prosesnya. Proses pembangunan infrastruktur pada suatu wilayah terkendala oleh beberapa hal, salah satunya yaitu permasalahan perekonomian daerah, contohnya adalah perkembangan ekonomi di daerah jauh lebih dipengaruhi oleh politik perekonomian yang digunakan oleh

pemimpin daerahnya, ketimbang oleh variabel-variabel yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari masalah aturan daerah, kemudahan memperoleh lahan, hingga perpajakan. Kepentingan pejabat daerah dan partai politik diduga menjadi penyebab utama arah pertumbuhan ekonomi di daerah. Hubungan antara pengusaha dengan pemimpin daerah, hubungan antara kontraktor untuk mendapatkan akses ke APBD sangat mewarnai terbentuknya pertumbuhan ekonomi di daerah. Kendala lain berupa kerjasama dan kinerja antara pemerintah dengan masyarakat dalam wilayah itu sendiri. Permasalahan tersebut karena negara seharusnya memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses kebijakan publik. Menjadi salah satu bentuk pengawasan rakyat pada negara dalam rangka mewujudkan *good governance*. Kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat yang seharusnya berjalan seiringan. Sehingga tidak akan terjadi kesalah pahaman antara pemerintah dan masyarakat, yang nantinya dapat mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan infrastruktur.

Gambaran proyek pemerintah terkait peningkatan pembangunan infrastruktur daerah, khususnya di daerah pedesaan terealisasi dalam proyek PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan). Tujuan dari proyek ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar pedesaan. Beberapa komponen proyek PPIP adalah, pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, yaitu jalan dan jembatan pedesaan, mendukung produksi pangan oleh petani seperti irigasi pedesaan. Selain itu juga mempengaruhi dalam penyediaan air minum dan sanitasi pedesaan.

Perbaikan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam artian kelangsungan hidup dan kemakmuran rakyat lebih diprioritaskan. Secara fisik dapat berupa pembangunan dalam bidang fasilitas umum contohnya seperti jalan raya, jembatan, sumber air bersih, drainase atau irigasi, kondisi pasar tradisional, sanitasi dan beberapa fasilitas lain yang menunjang kesejahteraan rakyat pada umumnya dan pada khususnya adalah penunjang usaha tani oleh petani sebagai obyek penelitian kesejahteraan.

Jumlah penduduk miskin per Kecamatan yang diperoleh dari Kabupaten Tuban dalam Angka pada tahun 2012 diketahui bahwa Kecamatan Jenu memiliki

jumlah keluarga miskin sebanyak 6005 KK dari 11792 KK yang tercatat. Berdasarkan jumlah penduduk miskin tahun 2012 yang didapat, diketahui bahwa Kabupaten Tuban masih tinggi. Namun, hal ini belum sepenuhnya membuktikan penurunan jumlah penduduk miskin dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Angka kemiskinan tersebut berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang: 1) ekonomi meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan; 2) sosial meliputi aktualisasi diri, partisipasi sosial, interaksi sosial dan; 3) budaya meliputi pelestarian kebudayaan, proses pewarisan kebudayaan, terlaksananya sebuah budaya.

Terkait dengan rencana pembangunan infrastruktur pedesaan, pemerintah adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Pada UU No 25 tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang secara utama menjadi kewajiban dan beban pemerintah, namun dalam prosesnya memungkinkan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam memberikan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) adalah program bantuan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat untuk kegiatan modal usaha produktif dan pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi berdasarkan kepadatan/jumlah penduduk di kecamatan yang bersangkutan sesuai dengan daftar statistik dari pusat. Program PIIP di desa Jenu yang dilaksanakan didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kesejahteraan petani maupun masyarakat umum yaitu perbaikan saluran drainase, irigasi, perbaikan jalan, dan perbaikan jembatan yang mendukung proses usahatani bagi petani.

Sasaran wilayah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di desa Jenu Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban merupakan salah satu desa yang dianggap sebagai desa tertinggal dan masyarakatnya mengalami ketidakmampuan secara finansial atau kemiskinan. Berdasarkan kondisi yang seperti itu maka Desa Jenu salah satu desa yang melaksanakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. Sehingga dengan diprogramkannya PIIP di desa maka masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya dalam pembangunan infrastruktur yang ada di desanya. Sehingga dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat di desa

tersebut adalah dengan tercapainya atau terwujudnya kesejahteraan hidup yakni sistem ketersediaan, distribusi atau akses ekonomi. Demikian peneliti ingin mengetahui bagaimana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan petani untuk meningkatkan ekonomi, sosial, pangan, pendidikan, peningkatan keterampilan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pembangunan demi mengentaskan kemiskinan.

Pengelolaan infrastruktur dapat terus dipertahankan oleh masyarakat jika masyarakat memiliki persepsi yang sama dalam menjaga, merawat, dan mengelola sarana dan prasarana yang tersedia dengan baik. Persepsi merupakan sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Jika persepsi masyarakat sama, maka infrastruktur pedesaan akan selalu dalam kondisi yang baik, sehingga pembangunan dapat menyeluruh dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik di wilayah itu sendiri maupun sekitarnya.

Penulis lebih menitikberatkan pada evaluasi dampak untuk mengungkapkan hasil dan dampak adanya PPIP di Kabupaten Tuban. Evaluasi dampak program ini dirasa penting untuk dilakukan karena cakupan program dan tingkat kemungkinan besar untuk menanggulangi kemiskinan. Jika selanjutnya terdapat kekurangan atau kegagalan program maka tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan dan perumusan kembali atau penyesuaian program yang akan datang.

1.2 Perumusan Masalah

Pemerintah Kabupaten Tuban bersungguh-sungguh dalam upayanya mencapai tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah pedesaan khususnya di wilayah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, namun faktanya masih banyak infrastruktur yang kurang memadai bahkan jauh dari harapan yang bisa dinikmati atau digunakan oleh masyarakat khususnya para petani Desa Jenu Kabupaten Tuban. Tingkat kepedulian masyarakat desa dalam peningkatan kesejahteraan mandiri masih di bawah harapan pemerintah, kurangnya kepedulian masyarakat dan terlalu bergantung pada bantuan pihak lain seperti pemerintah atau swasta dapat

dilihat dari kondisi infrastruktur desa yang sebelum dilakukannya Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan masih dalam kondisi yang belum baik jika dibandingkan dengan kondisi infrastruktur di perkotaan. Seperti kondisi jalan yang masih tanah dan tidak rata juga berlubang, tidak memiliki saluran drainase di pinggir jalan, masyarakat sedikit yang memiliki sumber air bersih dan sanitasi yang baik dan masih banyak memanfaatkan aliran sungai, serta irigasi yang terlihat apa adanya sehingga sering terjadi banjir. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban?
2. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan oleh Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban?
3. Bagaimana tingkat kesejahteraan petani desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban setelah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dilaksanakan dilihat dari indikator kesejahteraan?
4. Bagaimana persepsi petani mengenai pengelolaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Permasalahan yang dihadapi oleh seluruh pihak atau pelaku pembangunan menjadikan dasar tujuan dari Pemerintah untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan hidup petani dengan pelaksanaan program-program pembangunan dan upaya lainnya. Maka berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

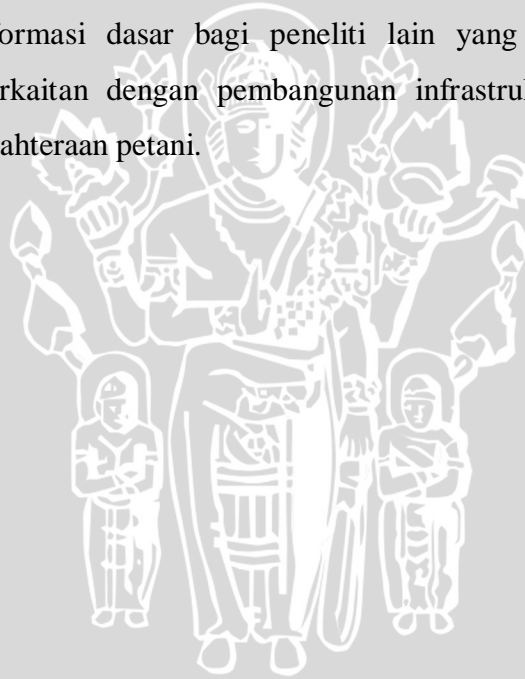
1. Mengkaji proses pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
2. Mengevaluasi dampak pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
3. Menganalisis tingkat kesejahteraan petani di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban setelah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dilaksanakan dengan menggunakan indikator kesejahteraan.

4. Menganalisis persepsi petani mengenai pengelolaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :

1. Bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang Pembangunan Infrastruktur Pedesaan terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dan memberikan masukan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur peesaan agar dapat berjalan dengan baik.
2. Bagi pihak pelaksana dapat dijadikan pengetahuan dan pengalaman baru dalam melakukan penelitian di bidang pembangunan terkait peningkatan pembangunan infrastruktur kawasan pedesaan terhadap kesejahteraan petani.
3. Sebagai bahan informasi dasar bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP). Sebagai tinjauan mengenai permasalahan yang terkait dengan obyek yang sama yaitu pelaksanaan PIIP atau fokus permasalahan yang sama, maka diteliti pula dari penelitian terdahulu sebagai perbandingan permasalahannya. Berikut ini gambaran singkat mengenai hasil penelitian tersebut :

Kuswara (2012) menjelaskan di dalam penelitiannya tentang pembangunan infrastruktur pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pembangunan infrastruktur, serta persepsi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan melalui perbaikan infrastruktur desa. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitiannya yaitu upaya pembangunan infrastruktur, sasaran pembangunan infrastruktur, indikator kesejahteraan masyarakat, persepsi masyarakat tentang pembangunan infrastruktur pedesaan faktor yang mempengaruhi dalam proses pembangunan infrastruktur pedesaan. Hasil dari penelitian tersebut antara lain masih banyak keadaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, kantor desa, pasar tradisional, sarana sanitasi dan drainase yang kurang layak. Hal tersebut terjadi karena masih banyak kendala dalam pembangunan infrastruktur. Kendala tersebut di antaranya rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut serta membangun wilayahnya. Selain itu, sinkronisasi antara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan pemerintah desa tidak berjalan dengan baik.

Anisatul (2014) meneliti tentang efektivitas program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program P4IP, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) dan untuk mengetahui,

mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program P4IP di desa di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan peneliti adalah menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah efektivitas penerapan program P4IP, faktor pendukung dan penghambat program daerah P4IP atau Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk melihat efektivitas program dapat dilihat dari: 1) tujuan program P4IP yaitu memberikan kemudahan akses kepada masyarakat miskin terutama dibidang infrastruktur di permukiman dan mendorong roda perekonomian masyarakat miskin agar menjadi lebih baik dengan adanya pembangunan infrastruktur, 2) Strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuan dari program P4IP yaitu menggunakan 5 pedoman atau prinsip pelaksanaan P4IP, 3) perencanaan yang matang dari program P4IP, 4) tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program P4IP, 5) Program P4IP di mata masyarakat. Program tersebut hampir tidak ada halangan dalam proses pelaksanaannya, dikarenakan faktor pendukung yang sudah lengkap dan dirasa mampu untuk mengatasi semua masalah yang diprediksi akan timbul dalam pelaksanaan program.

Asariansyah (2013) meneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di desa di Kabupaten Malang. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk melihat bagaimana proses atau bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam memberikan sumbangsinya pada pembangunan jalan yang ada pada program Pembangunan Berbasis Masyarakat yang diadakan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Malang. Serta untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat kaitannya dengan pembangunan jalan dan faktor apa saja yang menjadi kendala yang dialami masyarakat dalam memberikan sumbangsinya pada pembangunan jalan di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi fokus penelitiannya, yaitu: *pertama* kondisi pembangunan jalan. Fokus *kedua*, partisipasi masyarakat kecamatan Lawang pada pemerataan pembangunan infrastruktur jalan yang berupa : 1) uang, 2) pemikiran, 3) tenaga kerja, 4)

material untuk pembangunan, dan 5) bentuk sumbangsih lainnya. Hasil dari penelitian tersebut adalah Program Bantuan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Bangsimas) memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada masyarakat pedesaan untuk menentukan arah dan tujuan ke depan yang diinginkan oleh masyarakat di masing-masing desa. Optimalisasi potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap masyarakat pedesaan menjadikan pembelajaran bagi masyarakat desa bahwa dalam sebuah pembangunan juga dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan dalam kaitannya dengan pembangunan jalan dan pembangunan infrastruktur yang lainnya.

Ketiga penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu persamaannya dalam penelitian ini membahas tentang Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. Perbedaannya adalah sasaran dan fokus penelitian yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi perbandingan antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

2.2 Tinjauan tentang Kemiskinan

Kemiskinan berdasarkan Zain dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) adalah berasal dari kata “miskin” yang berarti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Sedangkan kemiskinan diartikan selalu berkaitan dengan orang atau kelompok yang serba kekurangan, menyangkut kebutuhan pokok minimum atau mendasar, yang tidak memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Berdasarkan hal di atas maka dapat dikatakan bahwa yang disebut masyarakat miskin umumnya mereka yang berada di tempat terpencil yang jauh dari keterbatasan sarana dan prasarana masih bersifat tradisional serta lemah dalam kemampuan berusaha karena keterbatasan tersebut. Kemiskinan digambarkan untuk orang dengan pendapatan yang diperolehnya tidak dapat memenuhi hidup minimumnya. Karena pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan kebutuhan (kebutuhan dasar minimum), yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan minimum.

Sumodiningrat (1997) membuat 3 kelompok pengertian kemiskinan, yaitu seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat

pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan relatif, yang adalah pendapatan seseorang yang sudah iatas garis kemiskinan, atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, meskipun ada usaha ari pihak luar untuk membantunya.

Berdasarkan pengertian tentang konsep kemiskinan di atas dapat disebut bahwa pada dasarnya keadaan kemiskinan itu pada umumnya diukur engan faktor pendapatan. Namun demikian konsep kemiskinan di atas masih terasa abstrak, karena ukuran-ukuran obyektif kemiskinan masih sangat bervariasi. Menurut BPPN (1997), program penanggulangan kemiskinan dapat menjadi gerakan masyarakat miskin menanggulangi kemiskinannya sejauh terciptanya kondisi berikut:

1. Aparat pemerintah harus mengembangkan pendekatan terhadap mesayarakat bukannya pendekatan “serba perintah” atau “serba harus”.
2. Rakyat miskin diperdayakan menurut potensi dan nilai-nilai yang dimilikinya dengan pemberian informasi selengkap-lengkapnya tentang apa saja yang relevan.
3. Pengembangan ekonomi rakyat diutamakan, bukan saja dari segi dana tetapi juga dari segi kepedulian semua pihak yang mengarah kepada pengembangan ekonomi rakyat.
4. Aparat pemerintah semakin mantap keberdayaannya, baik kerberdayaan segi teknnis, ekonomi, maupun dalam sikap keperdulianya terhadap penduduk.

2.2.1 Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat

Penanggulangan kemiskinan telah lama menjadi perhatian dalam proses pembangunan. Salah satu hal yang tampaknya harus dipikirkan dalam penanggulangan kemiskinan adalah memikirkan kebijakan yang dapat meningkatkan akses penduduk miskin untuk menguasai, memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang tersedia, sehingga mereka dapat menciptakan peluang kerja serta mencukupi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup

mereka secara mandiri. Secara umum standar pengukuran kemiskinan memakai standar Bank Dunia, namun pendekatan atau tepatnya dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dalam menghitung batas miskin. Kajian utama didasarkan pada ukuran pendapatan (ukuran finansial), dimana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan.

Gejala kemiskinan disebabkan oleh indikator keluarga yaitu rata-rata kelahiran dan kematian tinggi, angka pengangguran meningkat, tingkat pendapatan rendah, pengeluaran konsumsi pangan tidak mencukupi dan sebagainya. Sebagai indikatornya ditandai oleh pendapatan perkapita wilayah yang rendah, persentase rawan gizi yang tinggi, umur harapan hidup yang rendah disertai tingkat pendidikan yang rendah. Disamping itu kondisi pemukiman, transportasi, sarana air bersih, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan dan fasilitas umum lainnya yang tidak mencukupi (Supriatna, 2000).

Menurut Chambers (1987) penambahan penduduk cenderung berdampak pada penduduk miskin, terutama yang paling miskin. Mereka yang tidak mempunyai lahan, alat produksi sendiri, biasanya merupakan korban pertama dari langkah-langkah penghematan pemerintah. Jika keluarga-keluarga miskin itu memiliki banyak anggota maka akan memburuk kesejahteraan atau pendapatannya. Selain itu kemiskinan dapat muncul sebagai akibat nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri, karena nilai-nilai dan perilaku mereka dibentuk dari lingkungan kemiskinannya.

2.3 Tinjauan tentang Pembangunan

2.3.1. Definisi Pembangunan

Semua elemen di dunia membutuhkan pembangunan demi mencapai sesuatu untuk menunjang keberlangsungan kehidupan. Pembangunan adalah cara suatu negara dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pembangunan dilakukan secara menyeluruh di segala segi kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan.

Seperti yang dijabarkan oleh Tjokroamidjojo (1994), “Pembangunan adalah suatu proses pembaharuan yang kontinu dan terus-menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik”. Demikian diharapkan suatu wilayah yang mulanya memiliki infrastruktur yang kurang memadai, setelah terjadinya pembangunan maka dapat mewujudkan keadaan yang lebih baik. Karena pada hakekatnya, pembangunan merupakan suatu proses yang terencana yang dilakukan oleh manusia. Seluruh kegiatan pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat warga negaranya tanpa mendapat gangguan suatu apapun.

Menurut Siagian (2010) pembangunan itu sendiri memiliki makna sebagai berikut:

- a. Pembangunan merupakan suatu proses yang tanpa akhir
- b. Pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan secara terus menerus
- c. Pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan
- d. Pembangunan mengarah kepada modernitas
- e. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multidimensional, proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Namun pada dasarnya masyarakat haruslah turut aktif dalam pembangunan, bukan hanya sekedar jadi objek pembangunan semata. Khairuddin (1992) mengungkap bahwa partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena mereka itulah yang pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai obyek dan subyek pembangunan. Oleh karena itu, campur tangan langsung oleh masyarakat sangat penting dibutuhkan agar pembangunan terlaksana dengan baik.

Desa memiliki peran penting dalam pembangunan, karena menjadi struktur terendah dalam pembangunan Indonesia. Pembangunan Nasional bersumber dari pembangunan desa yang berdasarkan semangat desentralisasi, bahwa masyarakat mempunyai peranan dalam pembangunan desa. Pembangunan sudah dilakukan dari jaman dahulu akan tetapi masih belum dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Supaya pembangunan dapat tercapai sasaran oleh masyarakat, maka prinsip pembangunan, sarana dan ruang lingkungannya harus jelas.

Berikut ini penjelasan menurut Adisasmita (2006):

- a. Pembangunan pedesaan seharusnya merupakan prinsip transparansi (keterbukaan), partisipasi, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan berkelanjutan (*sustainable*).
- b. Sarana pembangunan pedesaan, yaitu untuk terciptanya peningkatan produksi dan produktivitas percepatan pertumbuhan desa, peningkatan ketrampilan dalam memproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan perkuat kelembagaan.
- c. Pengembangan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan, pemukiman dan lainnya). Pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya kawasan miskin) dan penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan.

2.3.2. Paradigma Pembangunan

Setiap individu memiliki pemikiran dan cara yang berbeda untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Oleh sebab itu, paradigma tidak dapat lepas dari semua segi kehidupan. Menurut Suryono (2010 “ Paradigma dimaksudkan sebagai cara pandang terhadap sesuatu persoalan yang di dalamnya terdapat sejumlah asumsi tertentu, teori tertentu, model tertentu dan solusi tertentu”. Berikut ini beberapa teori pembangunan yang digunakan dalam menganalisa permasalahan.

a. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat (*empowemment*) mulai tampak kepermukaan sekitar dekade tahun 1970-an, dan terus berkembang sampai dengan tahun 1990-an. Kemunculan konsep ini hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme. Konsep pemberdayaan dipandang sebagai bagian dari aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran *postmodernism*. Menurut Gunawan (2007) menjelaskan bahwa pemberdayaan sebagai konsep alternatif pembangunan,

dengan demikian menekankan otonomi pengambilan keputusan suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Fokusnya adalah lokalitas, karena *civil society*, lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal.

Munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dari aksi dan reaksi terhadap alam pikiran, tata-masyarakat dan tata-budaya sebelumnya yang berkembang di suatu negara. Memberdayakan masyarakat, ada beberapa hal yang perlu ditawarkan agar masyarakat mengerti dan memahami apa yang harus dilakukan sebagai subjek dalam turut serta melakukan pembangunan. Namun pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata dari pemerintah lalu turun ke masyarakat melainkan adanya interaksi dari kedua belah pihak tersebut. Seperti konsep pemberdayaan menurut Gunawan (2007), “merupakan hasil interaksi di tingkat idiologis maupun praktis. Tingkat idiologis, konsep ini merupakan hasil interaksi antara konsep *top down* dan *bottom up*, antara *growth strategy* dan *people centered strategy*”.

b. Pengertian Persepsi

Secara umum, persepsi adalah proses internal kita memilih mengevaluasi dan mengorganisasikan stimuli dan lingkungan kita. Definisi persepsi lainnya menurut Rakhmat (1998), adalah bahwa pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Selain itu, pengertian lain tentang persepsi juga banyak dijelaskan, di antaranya yaitu “Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka”. Syarat terjadi persepsi atau persepsi sebagai pengorganisasian pengamatan seseorang tentang suatu objek disekitarnya.

1) Syarat fisis

Segala sesuatu yang ada dari sekitar individu yang merangsang alat inderanya. Segala sesuatu tersebut dapat berupa: manusia, benda atau peristiwa, demikian pula segala sesuatu yang dapat didengar, dicium, diraba dan irasakan termasuk fisis. Sehingga dapat dianalisis melalui indera.

2) Syarat fisiologis

Kelengkapan organ tubuh yang dimiliki individu merespon segala rangsangan yang datang. Organ tubuh yang dimaksud alat indera, alat saraf sensori dan otak terjadi kesadaran sebagai hasil dari penginderaan tentang stimulus yang datang, kemudian diterima dan diteruskan oleh saraf sensoris ke susunan otak sampai terjadi suatu kesadaran. Setiap alat indera mempunyai sifat dan tingkat kepekaan masing-masing dalam merespon suatu perangsang.

3) Syarat psikologis

Syarat psikologis termasuk kebutuhan, kesiapan dan perhatian. Syarat ini tidak tampak dan hanya dapat dirasakan. Ketiga faktor ini memiliki hubungan yang erat yaitu kadar intensitas persepsi mengindikasikan intensitas kebutuhan dan kesiapan demikian pula sebaliknya.

2.3.3 Struktur Pedesaan Progresif

Pembangunan infrastruktur sebagai perbaikan prasarana pertanian sangat penting perannya. Salah satu peran pentingnya adalah melancarkan usaha distribusi pertanian. Maka dari itu perlu kita ketahui kajian terkait mengenai struktur pedesaan progresif. Struktur pedesaan progresif adalah suatu sistem sirkulasi di daerah pedesaan yang memperlancar arus barang/informasi/jasa penunjang pertanian antara tiap-tiap usahatani dengan masyarakat luas. Ditulis dalam bukunya “Menciptakan Struktur Pedesaan Progresif” Arthur T. Mosher (1966) menjelaskan bahwa struktur pedesaan progresif dalam pertanian yang modern berfungsi penting dalam pertumbuhan suatu negara. Struktur pedesaan progresif oleh para ahli biasa disebut prasarana pertanian. Produksi pertanian terjadi di dalam usahatani, yang tersebar di seluruh negara. Unsur-unsur penting dalam struktur pedesaan progresif adalah:

1. Kota-kota pasar (*market towns*) yang mempunyai tempat-tempat penjualan di mana petani-petani dapat membeli sarana produksi serta alat-alat pertanian dan pasar di mana petani-petani dapat menjual hasil panennya.
2. Jalan-jalan pedesaan untuk memperlancar dan menekan biaya pengangkutan hasil, serta untuk penyaluran informasi dan segala jasa-jasa di daerah pedesaan.
3. Percobaan-percobaan pengujian lokal (*local verification trials*) untuk dapat menentukan cara berusahatani yang paling baik sesuai dengan keadaan setempat.

4. Aparat penyuluhan dimana para petani dapat belajar tentang teknologi baru dan bagaimana menggunakan teknologi baru, dan
5. Fasilitas-fasilitas kredit untuk membiayai penggunaan input produksi.

Mosher menjelaskan agar dapat efektif maka masing-masing unsur tersebut sangat bergantung satu sama lain. Unsur-unsur tersebut harus dianggap *secara bersama sebagai satu "kegiatan" tunggal* atau sebagai satu komponen bagi suatu program untuk memajukan pembangunan pertanian dan untuk menciptakan pertanian yang modern. Jadi, menurut Mosher dalam bukunya menjelaskan bahwa suatu struktur pedesaan progresif adalah suatu sistem sirkulasi di daerah pedesaan yang memperlancar arus barang, informasi, serta jasa-jasa penunjang pertanian (penyaluran input usahatani, pemasaran hasil usahatani kredit usahatani, penelitian dan penyuluhan) antara tiap-tiap usahatani dengan masyarakat yang lebih luas.

a. Pusat Pasar

Upaya menciptakan struktur pedesaan progresif yang terpenting adalah bahwa dengan upaya tersebut tersedia kesempatan bagi masing-masing petani pengusaha untuk menjual hasil panennya dan membeli sarana produksi dan alat-alat pertanian yang dibutuhkan. Menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut setiap daerah pedesaan terpencil perlu mempunyai satu pusat pasar, sebab akan terlalu menyusahkan bagi petani apabila harus melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk memperoleh sarana produksi dan melakukan perjalanan lain lagi untuk memperoleh kredit dan lain-lain. Mosher juga menyebutkan bahwa ada jasa distrik yang dibutuhkan oleh daerah pedesaan yang terkait dengan pasar yaitu pasar distrik (grosir) untuk hasil bumi dan sarana produksi serta alat-alat pertanian. Hasil bumi jarang dapat diangkut secara ekonomis dari pusat-pusat pasar ke pasar-pasar di kota besar ataupun ke pelabuhan di suatu negara. Lebih ekonomis apabila mengirim ke pasar distrik lalu dari tempat tersebut dikirimkan lagi ke pasar-pasar pusat yang lebih besar. Jelas bahwa bagian penting dari struktur pedesaan progresif adalah pasar distrik yang diperlengkapi sedemikian rupa sehingga dapat mengurus hasil bumi maupun input produksi secara ekonomis.

b. Jalan-jalan Pedesaan

Sekurang-kurangnya setiap daerah pedesaan yang terpencil membutuhkan jalan yang menghubungkan pusat pasar dengan dunia luar, sehingga hasil panen dapat disalurkan secara ekonomis sedangkan sarana produksi dan alat-alat pertanian dapat didatangkan. Jalan merupakan fasilitas pendukung pertanian yang sangat penting, kondisi jalan di pedesaan sangat mempengaruhi arus distribusi sarana dan alat-alat pertanian dan hasil panen menuju ke tempat lain. Jalan-jalan yang menghubungkan pusat pasar dalam masing-masing desa atau daerah dengan pusat pasar grosir di distriknya merupakan perlengkapan regional bagi jalan-jalan pedesaan dalam masing-masing daerah pedesaan. Karena manusia dan barang-barang harus dapat bergerak dengan bebas dan mudah di dalam distrik usahatani. Jalan desa semakin menjadi penting apabila produktivitas usahatani meningkat. Pada mula hanya diperlukan untuk mengangkut hasil bumi dari kebun ke pasar, kemudian pupuk buatan dari pasar ke kebun. Kemudian digunakan untuk mempercepat jalannya traktor dan perlengkapan-perengkapan.

2.4 Infrastruktur Pedesaan

2.4.1. Pengertian Infrastruktur

Berbagai faktor sangat berpengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial, infrastruktur merupakan salah satu faktor terpenting. Pembangunan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan keadaan infrastruktur yang memadai. Setiap aspek sosial maupun ekonomi maupun aspek yang lainnya, keberadaan infrastruktur merupakan faktor utama dalam melakukan suatu kegiatan. Infrastruktur mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari keadaan infrastruktur di suatu wilayah. Jika semakin baik keadaan infrastruktur di wilayah tersebut, maka akan semakin maju pula keadaan masyarakat. Apabila wilayah tersebut memiliki infrastruktur yang memadai, maka dapat dikatakan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sejahtera, dan begitu pula sebaliknya. Demikian infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah.

Grigg (1988) mengungkapkan bahwa infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan dan fasilitas publik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia di bidang sosial dan ekonomi. Sedangkan definisi lainnya dijelaskan oleh Johnston (1981) bahwa infrastruktur adalah dasar jasa atau layanan yang memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam kegiatan industri, pertanian dan pembangunan ekonomi lainnya. Keinginan terbesar masyarakat adalah terpenuhinya fasilitas umum yang dapat menunjang pekerjaan mereka. Namun yang banyak terjadi pada kalangan masyarakat luas adalah terkendalanya kegiatan sehari-hari bahkan terganggunya pekerjaan masyarakat karena kurang diimbangi dengan sarana yang baik. Hal tersebut menjadi pemicu kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terhadap pengadaan atau peningkatan infrastruktur, baik fasilitas yang sudah ada, proses pengerjaan, maupun fasilitas umum yang masih dalam proses perencanaan, bagian yang harus digaris bawahi adalah perencanaan dan pengerjaan, karena kedua hal ini dapat diberlakukan pada fasilitas umum yang memang sudah ada, misalnya proses pembangunan jembatan yang sudah tidak layak pakai yang terbuat dari kayu yang menghubungkan antara beberapa desa. Maka dari itu PP Desa dan Kota No. 72 tahun 2005 tentang Pembangunan Infrastruktur, menjadi pedoman untuk melakukan pembangunan fasilitas umum pada wilayah yang ditentukan.

2.4.2. Upaya Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan. Ketersediaan sarana perumahan dan pemukiman, seperti layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, turut menentukan kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan rancangan yang baik maupun perawatan dan peningkatan fasilitas dan fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru melalui investasi dan pelayanan umum. Namun ketersediaan infrastruktur

masih tetap belum memadai yang dibuktikan dengan banyaknya kecelakaan di sektor transportasi, terjadinya krisis listrik, serta lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, dan sebagainya.

Upaya pembangunan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu upaya fisik, non fisik, dan upaya politis. Upaya fisik misalnya adanya suatu perencanaan pembangunan jalan di suatu wilayah, pembangunan jembatan. Sedangkan upaya non fisik contohnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dalam pembangunan desa tertinggal, pemerintah yang melakukan langkah persuasi atau membujuk masyarakat desa untuk membangun daerahnya. Upaya politis dalam bidang pembangunan misalnya musyawarah pembangunan melalui Musrenbagdes (Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan).

Berikut adalah beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan, antara lain :

a. Bidang Sumber Daya Air

Pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air yang diwujudkan melalui pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan air untuk berbagai kebutuhan pertanian seperti sumber irigasi atau pengairan usaha tani serta pengendalian daya rusak air ditujukan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun sering pula didapati kendala dan permasalahan yang sangat kompleks. Permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air tersebut antara lain:

- 1) Kemampuan penyediaan air menurun. Berkurangnya area resapan air dan menurunnya kapasitas lingkungan diikuti oleh menurunnya pemanfaatan prasarana sumber daya air baku seperti waduk akibat terjadinya percepatan sedimentasi dan pencemaran sungai oleh limbah permukiman dan industri. Menurunnya pemanfaatan prasarana tersebut juga terjadi pada saluran pembawa seperti jaringan irigasi, jaringan pipa dan instalansi penyedia air baku, serta prasarana pengendali banjir. Kondisi ini diperparah dengan kualitas operasi dan

pemeliharaan tampungan serta instalansi air baku yang masih rendah sehingga tingkat layanan prasarana sumber daya air menurun semakin tajam.

2) Tingkat layanan jaringan irigasi yang masih belum optimal. Kinerja jaringan irigasi belum dapat memenuhi kebutuhan air usaha tani terutama untuk pencapaian produksi padi dalam mencapai dan mempertahankan swasembada pangan nasional. Rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan pada jaringan irigasi.

b. Bidang Transportasi

Pembangunan transportasi terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan pemerintahan, dalam bidang pertanian digunakan sebagai media atau alat distribusi dan produksi pertanian serta pelancar akses ekonomi. Berbagai permasalahan masih terjadi dalam pembangunan sektor transportasi seperti tingkat keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi yang masih rendah.

c. Energi

Percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang energi masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain, ketergantungan pada produk minyak bumi yang masih tinggi sementara sumber daya minyak bumi terbatas, sedangkan cadangan sumber daya energi alternatif yang cukup besar, keterbatasan infrastruktur gas bumi, kapasitas produksi kilang, dan distribusi, pertumbuhan dan intensitas energi yang masih tinggi dan keterbatasan dana untuk pengembangan sektor energi dan sementara iklim bisnis sektor energi kurang menarik minat investor swasta dalam negeri dan asing, termasuk pengembangan teknologi energi baru dan efisiensi energi.

d. Ketenagalistrikan

Berbagai permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat pedesaan yaitu masih belum mendapatkan pasokan listrik yang cukup dan masih terlalu sulit untuk membangun gardu-gardu listrik di daerah terpencil. Selain itu, dengan keadaan infrastruktur jalan yang kurang memadai menjadi faktor utama bagi penyediaan listrik di wilayah terpencil.

e. Perumahan dan Permukiman

Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang mencakup perumahan, air minum, air limbah, persampahan dan drainase ditujukan untuk memenuhi standar pelayanan. Permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah masih terdapatnya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak, masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air minum dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP) yang layak, serta masih kurangnya dukungan infrastruktur penyedia air minum dan penyehatan lingkungan untuk mendukung sektor industri, pariwisata dan perdagangan.

f. Air Minum dan Air Limbah

Pembangunan di bidang air minum dan air limbah mempunyai permasalahan yang dihadapi antara lain, terbatasnya cakupan dan kualitas pelayanan Perusahaan daerah Air Minum (PDAM), pemberlakuan tarif air minum yang terlalu tinggi, masih rendahnya tingkat pengolahan tinja, serta masih rendahnya pelayanan sistem pembuangan air limbah. Permasalahan mengenai air minum dan pengelolaan air limbah sangat penting bagi tingkat kesehatan masyarakat. Semakin baik dan sehat air minum yang tersedia dan kemampuan pengelolaan air limbah yang baik berarti kesehatan masyarakat semakin baik, begitu pula sebaliknya.

g. Persampahan dan Drainase

Pembangunan limbah persampahan dan drainase, memiliki permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain masih rendahnya pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan sehingga berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan, menurunnya kualitas manajemen tempat pembuangan akhir (TPA), serta tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematas air hujan akibat semakin meningkatnya volume sampah yang dibuang di saluran drainase. Jika pengelolaan persampahan dan drainase dilakukan dengan baik maka kesehatan masyarakat baik juga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

2.4.3. Tujuan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Keberadaan pemerintah pada konsep pelayanan publik sangat menunjang prospek kinerja pemerintah baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Seperti yang sudah diketahui, banyak penilaian masyarakat terhadap proses

pelayanan publik. Tidak dapat terelakan lagi apabila opini publik mengenai pelayanan aparatur pemerintah di beberapa aspek sangatlah bervariasi. Ada beberapa faktor yang dapat memperkuat opini publik ini, contohnya seperti, proses pelayanan aparatur pemerintahan dapat memakan waktu lebih dari yang bisa diperkirakan oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu fasilitas yang disediakan aparatur kurang memadai pada beberapa wilayah, ataupun kinerja aparatur pemerintahan itu sendiri, oleh karena itu pemerintah perlu menetapkan suatu perencanaan dan tujuan dalam menjalankan suatu sistem agar nantinya juga bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Suatu perencanaan atau pelaksanaan program, pasti selalu ada hasil yang ingin dicapai atau diwujudkan. Begitu pula dalam suatu pembangunan suatu wilayah. Hal itu dilakukan tidak lain ditujukan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Senada dengan pernyataan tersebut, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan juga memiliki tujuan yang ingin dicapai. Beberapa tujuan tersebut yaitu:

- a. Tujuan jangka panjang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Tujuan jangka menengah adalah:
 - Meningkatkan akses masyarakat miskin dan yang mendekati miskin ke infrastruktur dasar di wilayah pedesaan
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan infrastruktur pedesaan.

Diharapkan dengan adanya tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah, pembangunan yang dilakukan diharapkan akan tepat sasaran dan menjangkau semua aspek yang juga akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pembangunan yang dilaksanakan dengan campur tangan langsung dari masyarakat juga akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Keadaan yang seperti itu maka tujuan pemerintah tercapai.

2.5 Kesejahteraan Masyarakat

2.5.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu wujud keberhasilan masyarakat yang mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha

pembangunan dikatakan berhasil jika masyarakatnya sejahtera dalam bidang manapun. Masyarakat sejahtera tak lepas dari pengertian masyarakat ideal yaitu masyarakat mandiri menurut Khairuddin (2012). Indikator masyarakat mandiri adalah :

- a. Kemampuan masyarakat untuk mengusahakan, memelihara atau merawat segenap sumber, aset dan sarana yang ada, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik.
- b. Kemampuan masyarakat untuk bangkit dari keadaan jatuh atau mundur sebagai akibat kekeliruan yang ditempuhnya.
- c. Kemampuan masyarakat untuk meningkatkan atau mengembangkan sumber, asset/peralatan yang ada.
- d. Kemampuan masyarakat untuk memberikan respon positif terhadap perubahan sosial yang sedang berlangsung.

Pembangunan kesejahteraan seluruh untuk rakyat, keberhasilannya ditentukan berbagai faktor dan bukan semata-mata karena tersedianya dana. Lingkup permasalahan kesejahteraan sekarang ini semakin kompleks baik karena adanya faktor-faktor struktur penduduk, maupun yang ditimbulkan oleh intervensi dan inovasi pembangunan. Pada dasarnya pembangunan kesejahteraan rakyat haruslah ditujukan untuk membangun kehidupan penduduk yang bermartabat, berkualitas secara berkelanjutan, antara lain menyangkut akses penduduk khususnya penduduk miskin terhadap pemenuhan hak dasar atas pangan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, air bersih, pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, perlindungan hak tanah, rasa aman, serta kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat atau keluarga yang umum adalah :

- a. Pendapatan, kekayaan dan pekerjaan.
- b. Lingkungan kerja
- c. Kesehatan
- d. Pendidikan
- e. Ketertiban sosial
- f. Milik pribadi yang diinginkan masyarakat
- g. Kesempatan rekreasi dan menggunakan waktu senggang.

Dalam kebijaksanaan, diarahkan untuk mendorong kesadaran, tanggung jawab dan kemampuan agar mereka secara bersama-sama atau perorangan dapat mencapai tingkat kesejahteraan. Peningkatan dalam kesejahteraan ekonomi dapat diusahakan, salah satunya dari peningkatan taraf hidupnya. Sedangkan peningkatan taraf hidup itu sendiri hanya bisa dicapai jika ada peningkatan kemampuan ekonomi melalui peningkatan usaha atau pendapatan dari rumah tangga tersebut.

Pada umumnya masyarakat di pedesaan adalah para petani yang masih menggunakan tata cara dan teknologi tradisional dalam menjalankan usaha taninya. Untuk itulah pemerintah selalu mengupayakan peningkatan produksi pertanian, menyarankan teknologi pertanian yang tepat guna melalui penyuluhan-penyuluhan. Namun kendala utama adalah permodalan serta sarana transportasi yang kurang mendukung.

Kesejahteraan masyarakat memiliki fungsi yaitu :

- a. Fungsi penyembuhan dan pemulihan, bertujuan untuk meniadakan hambatan-hambatan atau masalah sosial yang ada.
- b. Fungsi pencegahan, meliputi langkah-langkah untuk mencegah jangan sampai timbul masalah sosial yang baru.
- c. Fungsi pengembangan, untuk mengembangkan kemampuan orang maupun masyarakat agar dapat hidup secara produktif.
- d. Fungsi penunjang, yaitu menumpang usaha-usaha lain agar dapat lebih berkembang.

2.5.2 Indikator Kesejahteraan

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia adalah kesejahteraan. Baik tinggal di kota maupun yang di desa, semua mendambakan kehidupan yang sejahtera baik lahir maupun batin. Namun, dalam prosesnya, kehidupan yang dijalani oleh manusia tidak selamanya dalam kondisi sejahtera. Pasang surut kehidupan membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara agar tetap sejahtera. Mulai dari pekerjaan kasar hingga jabatan yang tinggi. Jangankan halal, yang harampun rela dilakukan demi kesejahteraan hidup. Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, pertahanan, keamanan nasional, dan lain sebagainya.

Berbagai bidang kehidupan meliputi jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mendapatkan kesejahteraan itu memang tidak gampang. Tetapi juga tidak berarti mustahil didapatkan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu indikator kesejahteraan tersebut. Adapun indikator tersebut menurut BPS pada tahun 2005 diantaranya adalah :

- a. Jumlah dan pemerataan pendapatan. Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapatan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Pendapatan yang mereka dapat ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.
- b. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau. Pengertian mudah di sini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayar oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Pendidikan yang mudah dan murah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat. Oleh sebab itu kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sementara itu, sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta

didiknya. Pendidikan disini, baik yang bersifat formal maupun non formaal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Angka melek huruf menjadi lebih tinggi, karena masyarakatnya mampu menjangkau pendidikan dengan biaya murah. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

- c. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya. Inilah indikator tentang kesejahteraan rakyat. Indikator ini akan menjadi faktor penentu dalam usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak dalam mencapai kesejahteraan.
- d. Kondisi infrastruktur yang layak. Adanya infrastruktur yang memadai, masyarakat semakin terbantu dalam melakukan kegiatan diberbagai bidang. Keempat hal ini diyakini merupakan puncak dari masalah kesejahteraan yang didambakan oleh semua orang. Merujuk dari ketiga indikator tersebut jika tidak disertai pembangunan infrastruktur yang memadai maka dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar.

Indikator kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari pengukuran tingkat kemiskinan. Jika suatu masyarakat dikatakan sejahtera maka tingkat kemiskinan rendah begitu pula sebaliknya. Akan tetapi dalam pengukuran tingkat kemiskinan perlu terlebih dahulu ditinjau dari batas kecukupan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, dengan demikian menurut data Badan Pusat Statistika tahun 2005 mengemukakan bahwa "Seseorang dikatakan fakir miskin bila Nilai

pengeluaran perbulan kurang dari garis yang ditetapkan oleh BPS sebesar Rp 150.000,00. Per orang per bulan dan dianggap sebagai fakir miskin”.

Berikut ini hasil kutipan dari situs resmi Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat mengenai beberapa indikator yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia dan yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, antara lain:

- a. Laju pertumbuhan penduduk yang masih miskin;
- b. Jumlah penduduk miskin masih tinggi;
- c. Tingkat pendapatan masyarakat masih rendah;
- d. Angka pengangguran masih tinggi;
- e. Kualitas sumber daya manusia masih belum optimal;
- f. Angka kematian bayi dan anak masih tinggi;
- g. Angka kematian ibu melahirkan masih tinggi;
- h. Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih rendah;
- i. Pemahaman terhadap ajaran agama dan moral masih perlu ditingkatkan;
- j. Pemahaman etos kerja dan karya masih kurang memadai;
- k. Kualitas lingkungan dan sumber daya alam mengalami kemerosotan;
- l. Kesenjangan antar daerah masih cukup tinggi;
- m. Ketaatan terhadap pemahaman birokrasi perlu ditingkatkan;
- n. Infrastruktur masih dalam keterbatasan.

(Menkokesra, 2015)

Banyaknya faktor kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, peran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diharapkan bisa mengurangi penyebab atau dapat memecahkan masalah terkait dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Pengembangan wilayah juga perlu diperhatikan karena daerah yang memahami kebutuhan dan keadaan yang perlu untuk ditingkatkan, menurut Sumodiningrat (2007), “Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dilaksanakan sebagai tindak lanjut program penanggulangan kemiskinan (IDT) agar lebih terpadu, terarah dan berkesinambungan. Program ini dijalankan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemampuan aparat daerah”.

2.6 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP)

Dalam pengelolaan PIIP, masyarakat mendapatkan kewenangan untuk mengelola semua kegiatan secara mandiri dan partisipatif dengan ikut terlibat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan kegiatan. Selain itu masyarakat mendapat pendampingan dari fasilitator, dukungan dari pemerintah dan juga adanya kelembagaan PIIP berupa organisasi pengelolaan di tingkat desa dan kecamatan yang anggotanya berasal dari masyarakat serta mendapat pelatihan-pelatihan yang mendukung peningkatan kemampuan masyarakat sebagai pelaku utama PIIP dan penerima manfaat hasil pembangunan. Keberhasilan program pembangunan dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, mekanisme pelaksanaan program serta proses pendampingan dalam menerapkan pendekatan partisipasi. Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kewenangan atau kekuasaan masyarakat untuk mengontrol atau menentukan pengambilan keputusan dalam berbagai tahap kegiatan tersebut untuk meyakinkan bahwa kepentingannya dapat dipenuhi. Suatu program meliputi serangkaian kegiatan yang relatif luas. Program menunjukkan:

- a. Langkah-langkah pokok yang diperlukan untuk mencapai tujuan
- b. Satuan atau para anggota organisasi yang bertanggung jawab atas setiap langkah
- c. Urutan dan waktu setiap langkah

Program dapat disertai suatu anggaran atau sekumpulan anggaran bagi kegiatan-kegiatan yang diperlukan, hal tersebut dijelaskan oleh Handoko (1984). Menurut definisi yang dikemukakan oleh *United Nation* yang dikutip oleh Zauhar, kata “program” diartikan sebagai: “*program is taken to mean a form of organized social activity with a specific objective, limited in space and time. It often consist of an interrelated group of project an usually limited to one or mate on going organization and activities.*” (Zauhar, 1993). Zauhar juga mengungkapkan bahwa langkah-langkah siklus atau program dan proyek adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan

Kegiatan ini dimulai dengan konseptualisasi dan identifikasi. Hal ini dilakukan agar diperoleh informasi yang membantu untuk menetapkan bidang-

bidang kegiatan program dan proyek yang akan dilakukan dan nantinya merupakan kegiatan yang logis dan penting. Hal tersebut menurut dapat dilihat dari efisiensi penggunaan tenaga biaya dan waktu. Pada tahap ini kemudian dilakukan studi kelayakan dalam tingkat membantu dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan pada saat yang tepat dapat dipergunakan untuk memulai program-program perbaikan. Kelayakan ini harus membuat informasi serta analisis yang berkaitan dengan :

- 1) Segi ekonomi dari seluruh proyek
- 2) Segi keuangan seluruh proyek terutama sumber pembiayaan
- 3) Segi teknis seluruh proyek, khususnya dalam pelaksanaan dan pengoperasian proyek
- 4) Dampak politik seluruh proyek yang sering merupakan pertimbangan yang dominan memroyeksikan seluruh kegiatan
- 5) Segi manajemen seluruh proyek dalam arti tersedianya tenaga pimpinan yang bertanggungjawab atas keseluruhan pengelolaan proyek
- 6) Desain sementara seluruh proyek.

Setelah selesai lalu dilanjutkan dengan tahap desain yang mana akan tergambar perincian yang lebih detail dan cermat. Detail tersebut meliputi daftar khusus catatan kegiatan, penjadwalan sumberdaya, bidang kerja, usaha dan administrasi kepemimpinan atau koordinasi. Tahap ini merupakan tahapan yang paling penting.

b. Implementasi Program

Implementasi program diperlukan adanya kerjasama antar instansi terkait dengan program yang dimaksud dengan pelaku-pelaku yang ada di dalamnya dan tertuju. Faktor lain yang mempengaruhi adalah sumberdaya alam, bahan perlengkapan, tata kerja, sangat mendukung keberhasilan jalannya suatu program. Pelaksanaan program ini akan berjalan sesuai dengan tujuannya apabila terdapat partisipasi masyarakat.

c. Evaluasi dan Monitoring

Menurut Tjokroamidjoyo (1990) menjelaskan biasanya evaluasi dan monitoring dilakukan melalui sistem pelaporan kemajuan (*progress repoting*), *review* dan evaluasi serta hasil monitor untuk keperluan kebijaksanaan

pengambilan keputusan kembali (*Re-implementation*). Hasil monitoring dan evaluasi ini nantinya merupakan dasar untuk menilai keberhasilan program dan proyek serta sebagai bahan untuk mengadakan perubahan atau perluasan rencana kerja bila hal ini diperlukan. Tahapan ini permasalahan dan kendala selama pelaksanaan program akan dapat dianalisis dan dipecahkan dengan baik.

2.6.1 Definisi Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP)

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan *Millennium development Goals (MDGs)* atau tujuan pembangunan milenium yang merupakan kesempatan global untuk mencapai target pembangunan bersama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan; pendidikan dasar untuk semua; kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan; mengurangi angka kematian anak; meningkatkan kesejahteraan ibu; memerangi penyakit menular dan penyakit lainnya; menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PIIP dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Program ini bersifat lintas sektoral dan saling mendukung dengan program lain, yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat serta memerlukan keserasian dan keterpaduan langkah. Demikian dapat dikatakan bahwa PIIP adalah integritas dan sinkronisasi dari program-program sebelumnya yakni antara kegiatan bantuan pembangunan sarana prasarana dengan kegiatan pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif secara selaras dan berkesinambungan (saling mendukung dengan program-program lainnya) sehingga masyarakat semakin dapat diberdayakan dalam upaya meningkatkan taraf kehidupannya. PIIP merupakan koreksi terhadap sistem pembangunan terdahulu yang pada umumnya dinilai bersifat sentralistik. PIIP juga merupakan penyempurnaan terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan terdahulu seperti IDT dan P3DT. PIIP diharapkan dapat menjadi suatu sistem pembangunan yang memungkinkan segala bentuk sumberdaya

pembangunan dapat diakses secara merata dan adil oleh seluruh pelaku dan komponen bangsa (Zauhar, 1993).

2.6.2 Tujuan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pengadaan PPIP memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan umum untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan untuk tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentang dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar.
- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
- d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembagawadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya menanggulangi kemiskinan.
- e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.
- h. Menyediakan sarana dan prasarana sosial, dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat miskin.

2.7 Dampak Pembangunan

2.7.1 Pengertian tentang Dampak Sosial-Ekonomi

Beberapa pengamat pembangunan mendefinisikan bahwa pembangunan itu mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dikatakan berhasil bila angka pertumbuhan ekonominya cukup

tinggi dan sekaligus membawa perubahan yang ada di masyarakat pada kondisi kehidupan yang lebih baik. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan menjadi kurang seperti yang diharapkan bila hasil pembangunan tidak apat membawa perubahan kondisi sosial-ekonomi dan kesejahteraan pada petani ke tingkat yang lebih baik. Kegagalan pembangunan tersebut dapat disebabkan karena perencanaan yang kurang baik. Seperti yang dijelaskan oleh Soekartawi (1994) hal ini umumnya disebabkan karena:

- a. Kelirunya menerjemahkan strategi yang telah disepakati, sehingga eksekusi pembangunan menjadi lebih terasa
- b. Kurangnya kemampuan melakukan atau merancang perencanaan yang disebabkan karena terbatas sumber daya manusia yang ada
- c. Kurangnya dana yang tersedia sehingga pelaksanaan dari perencanaan yang baik menjadi terselat-sendat
- d. Kurang baiknya dukungan administrasi sehingga perencanaan yang melibatkan berbagai pihak menjadi tidak berjalan karena lemahnya administrasi dan koordinasi
- e. Kurangnya kesinambungan perencanaan

Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan yang tidak didasarkan pada perencanaan yang baik akan menimbulkan eksekusi yang tidak apat diharapkan. Setiap kegiatan pembangunan selalu membawa dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Harapan tentunya adalah dampak positif dan sebisa mungkin memperkecil atau menghindari dampak negatif yang ditimbulkan. Jika untuk mengetahui dampak positif dan negatif, maka diperlukan pengertian yang sama tentang apa yang dimaksud dengan dampak itu.

Dampak (*impact*) adalah akibat dari suatu kegiatan misalnya kegiatan pembangunan. Dampak ini dapat berakibat positif atau negatif yang keduanya perlu diantisipasi. Jika melihat dampak, perlu dilihat terlebih dahulu tentang program, output, *goals* dan *impact*. Dampak dari kegiatan pembangunan dapat merambat ke semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial ataupun budaya dan pertahanan keamanan. Karena dampak kegiatan pembangunan itu muncul karena ada pihak yang diuntungkan (*grainers*) dan pihak yang dirugikan (*lossers*), maka penilaian dampak sosial-

ekonomi-budaya juga perlu mengacu pada mereka yang diuntungkan dan yang dirugikan ini (dari kegiatan pembangunan). Demikian maka ada suatu dampak atau perubahan positif yang terjadi jika pembangunan pertanian ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari bidang usaha-usaha pertanian di daerah.

2.7.2 Dampak Pembangunan Pertanian

Selain ditunjang dan didukung oleh sarana-sarana produksi pertanian, ada pula hal penting yang harus diperhatikan agar pembangunan pertanian dapat memperbaiki sumber daya manusia khususnya bagi petani Indonesia. Pembangunan dalam mendukung usaha pertanian sangat penting dilakukan. Ditulis dalam bukunya “Menggerakkan dan Membangun Pertanian”, oleh A. T. Mosher (1966) bahwa dalam rangka pembangunan pertanian, segala kegiatan harus dapat ditujukan kepada:

- a. Mengubah proses-proses produksi pertanian, atau
- b. Mengubah perilaku petani, atau
- c. Mengubah corak masing-masing usaha tani, atau
- d. Mengubah hubungan antara biaya dan penerimaan bagi tiap perusahaan pertanian

Unsur-unsur pembangunan pertanian yang terdiri dari petani dan usaha tani memiliki permasalahan yang akan menyangkut bidang kehidupan. Karena sebagian masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat pedesaa memperoleh sumber pendapatan dari bidang pertanian. Maka hal-hal yang terkait dengan petani aalah bagaimana merubah atau meningkatkan perilakunya dalam menuntut kemajuan, yaitu bagaimana meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, meningkatkan semangat kerjanya, meningkatkan efisiensi usahanya sehingga akan menciptakan perubahan sosial terhadapnya. Pembangunan pertanian akan berlangsung apabila tersedianya syarat-syarat pokok namun juga memerlukan faktor pelancar pembangunan pertanian agar pembangunan pertanian berlangsung lancar. Syarat-syarat mutlak pembangunan pertanian seperti yang disebutkan oleh A. T. Mosher (1966) yaitu :

- a. Terjaminnya pasaran untuk hasil-hasil usaha tani
- b. Adanya teknologi yang senantiasa berubah

- c. Tersedianya sarana produksi setempat (secara lokal)
- d. Adanya perangsang produksi bagi petani
- e. Pengangkutan

Telah disebutkan oleh Mosher mengenai syarat-syarat mutlak pembangunan pertanian yang terkait dalam upaya pembangunan infrastruktur pedesaan ialah terjaminnya pasaran untuk hasil-hasil usahatani yang diwujudkan dalam upaya pemberdayaan pusat pasar sebagai fasilitas tersedianya kesempatan bagi masing-masing petani dalam usahanya untuk menjual hasil buminya dan membeli sarana produksi dan alat-alat pertanian yang dibutuhkan. Sedangkan syarat lainnya adalah pengangkutan, pengangkutan di sini terbatas dalam usaha memperlancar alur distribusi ekonomi yakni pembangunan jalan-jalan dan jembatan desa untuk memperlancar dan menekan biaya pengangkutan hasil, serta untuk penyaluran informasi dan segala jasa-jasa di daerah pedesaan. Sedangkan faktor-faktor pelancar pembangunan pertanian diantaranya adalah:

1. Pendidikan pembangunan
2. Kegiatan gotong royong petani
3. Perbaikan dan perluasan tanah pertanian
4. Perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian

Memberikan permintaan produksi pertanian kepada pasar yang dalam hal ini berarti distributor, konsumen atau masyarakat, maka petani dituntut untuk meningkatkan mutu dan kualitas hasil produksi sehingga memenuhi apa yang dibutuhkan pasar. Memenuhi permintaan hasil produksi tersebut dengan baik-baik secara kualitas dan kuantitas, maka usaha-usaha tani memerlukan perubahan-perubahan cara dengan menerapkan teknologi baru yang akan memberikan keuntungan produksi yang lebih baik dari sebelumnya. Penemuan teknologi baru tersebut hakekatnya sebagai sarana produksi pertanian yang akan dilaksanakan oleh petani-petani yang tersebar dimana-mana. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan perangsang kepada petani terkait dengan harga satuan produksi pertanian, penghargaan, pelayanan sarana produksi, dan lain-lain agar gairah dan kesejahteraan petani meningkat.

Keberhasilan pembangunan pertanian seperti yang dijelaskan sebelumnya tidak terlepas dari penciptaan struktur pedesaan yang mendukung

terselenggaranya pembangunan pertanian. Yang dimaksud dengan struktur pedesaan itu diantaranya adalah adanya pasar-pasar yang menyediakan kesempatan bagi para petani untuk membeli sarana-sarana produksi yang diperlukan dan dapat menjual hasil usahanya sendiri; cukupnya jalan-jalan pedesaan untuk mempercepat dan mengurangi biaya penyaluran atau pengangkutan barang-barang, informasi, atau jasa khususnya dalam bidang pertanian; serta adanya kegiatan penyuluhan, dimana petani dapat belajar dan mempelajari penerapan teknologi baru (Mosher, 1966).

2.7.3 Dampak Sosial Pembangunan Pedesaan yang Partisipatif untuk Masyarakat

Pembangunan pedesaan yang partisipatif merupakan suatu konsep fundamental yang berlaku dan dilakukan sejak dahulu hingga sekarang dan tetap relevan untuk masa depan. Partisipasi masyarakat itu mengikuti perkembangan zaman dari sistem pemerintahan yang berlangsung dalam suatu kurun waktu. Sistem pemerintahan yang sentralistik, mekanisme perencanaannya adalah *top-down*, dan partisipasi masyarakatnya adalah bersifat mobilisasi atau pengerahan massa. Sedangkan dalam sistem pemerintahan yang bersifat otonomi daerah, mekanisme perencanaannya adalah *bottom up* dan partisipasi masyarakatnya dilakukan dengan kesadaran dan kebersamaan yang tinggi.

Menurut Adisasmita (2013) dalam bukunya, "Pembangunan Perdesaan" menjelaskan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan pedesaan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam pelaksanaan program yang dikerjakan. Dana atau anggaran pembangunan yang tersedia adalah relatif terbatas sedangkan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan jumlahnya relatif banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi pembangunan program/proyek di masyarakat. Perencanaan

pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Adisasmita mengatakan, “anggota masyarakat bukan merupakan obyek pembangunan. Anggota masyarakat daerah perdesaan sebagian besar terdiri dari petani, yang sebagian besar daripadanya merupakan petani kecil, dan bahkan sebagian dari mereka merupakan buruh tani, tidak memiliki lahan pertanian lagi, sehingga mereka menjadi buruh tani”. Maka kedudukan petani yang lemah itu, harus diubah menjadi kuat, maju dan mandiri, sehingga peranannya dalam pembangunan menjadi subyek pembangunan. Adanya peran aktif dari masyarakat memberikan manfaat sekurang-kurangnya, yakni:

1. Anggota masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengidentifikasi bidang-bidang/sector-sector yang perlu dilakukan perbaikan, dengan demikian diketahui arah masa depan mereka.
2. Anggota masyarakat dapat berperan dalam perencanaan masa depan masyarakatnya tanpa memerlukan bantuan para pakar atau instansi perencanaan pembangunan.
3. Masyarakat dapat menghimpun sumber daya dan sumber dana dari kalangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki masyarakat.

Pada masa yang lalu anggota masyarakat bersifat pasif, maka dalam pembangunan masa depan sifat tersebut perlu dimotivasi secara lebih kreatif dan mampu untuk memanfaatkan peluang, dengan demikian masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.

Partisipasi masyarakat sebagai partisipasi vertikal dan horisontal. Partisipasi vertikal terjadi dalam kondisi tertentu dimana masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan dimana masyarakat berbeda dalam posisi bawahan pengikut atau klien. Partisipasi horisontal terjadi karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai

kemampuan untuk berprakarsa dimana setiap anggota kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu sama lain dalam usaha bersama, maupun dalam rangka kegiatan dengan pihak lain. Berdasarkan pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa dampak partisipasi masyarakat yang di tumbuhkan dari atas, masyarakat cenderung lebih bersifat pasif, dan jika partisipasi itu bersifat horisontal, maka akan menumbuhkan sifat aktif dan mandiri.

Beberapa pendapat di atas dapat di ketahui bahwa masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan, sekaligus juga sebagai objek atau sasaran dari pembangunan, bukan saja mereka memberi tetapi juga sebagai pelaksana, penerima hasil dan mereka juga memelihara dan memperbaiki kerusakan prasarana infrastruktur yang berhasil dibangun. Namun demikian, persoalan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan seringkali berlangsung tidak efektif. Cukup banyak kendala yang timbul yang sering kali tidak mampu di antisipasi. Sedangkan partisipasi terbujuk adalah jika seseorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakini melalui penyuluhan atau oleh pengaruh orang lain sehingga berpartisipasi secara sukarela di dalam kelompok aktivitas tertentu. Adapun partisipasi terpaksa dapat terjadi dalam berbagai cara, yaitu partisipasi terpaksa oleh hukum dan terpaksa keadaan sosial ekonomi. Partisipasi terpaksa oleh hukum terjadi bila orang-orang dipaksa melalui peraturan atau hukum. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dengan derajat pemaksaan yang berbeda-beda, misalnya anggota masyarakat wajib memelihara fasilitas sosial dan utilitas umum, hal ini tertuang di dalam peraturan/instruksi menteri dalam negeri. Partisipasi terpaksa karena kondisi si ekonomi terjadi bila seseorang yang tidak turut di dalam suatu kegiatan akan mendapatkan kesulitan dalam aspek sosial ekonomi, misalnya bila seseorang tidak turut serta dalam pemeliharaan prasarana lingkungan di kampungnya maka ia akan disisihkan dari pergaulan tetangganya. Jadi secara garis besar untuk mencapai tujuan yang melibatkan partisipasi masyarakat mencakup pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan tindakan (*action*) dari masyarakat itu sendiri.

III. KERANGKA TEORITIS

3.1 Kerangka Pemikiran

Kondisi perekonomian Indonesia jika dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya masihlah harus ditindak lanjuti akar permasalahannya. Jika dianalisis akar masalahnya pastilah tingkat kemiskinan yang masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang lainnya. Kemiskinan tersebut dapat dikarenakan tingkat pengangguran yang tinggi, kualitas sumber daya manusia dan produktivitasnya masih rendah, modal yang dimiliki terbatas, terbatasnya akses terhadap ekonomi serta terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam mensejahterakan dirinya merupakan masalah yang sangat berkaitan dengan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan peran yang besar dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya dalam bidang pembangunan infrastruktur.

Gambaran proyek pemerintah terkait peningkatan pembangunan infrastruktur daerah, khususnya di daerah pedesaan terealisasi dalam proyek PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan). Tujuan dari proyek ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar pedesaan. Beberapa komponen proyek PPIP adalah, pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, yaitu jalan dan jembatan pedesaan, mendukung produksi pangan oleh petani seperti irigasi pedesaan.

Adanya rangsangan dari program PPIP, masyarakat mampu memahami pentingnya peran diri mereka dalam usaha pengembangan kesejahteraan dan pembangunan demi keluar dari lingkaran setan kemiskinan dan mampu berpartisipasi dalam prosesnya. Pemerintah tidak tinggal diam dalam melakukan pembangunan, hal ini dilakukan pemerintah untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Karena hingga saat ini, kondisi infrastruktur yang berada di wilayah pedesaan Kabupaten Tuban sangat jauh dari harapan bahkan boleh dikatakan sudah tidak layak. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan berbagai langkah demi memperbaiki keadaan infrastruktur. Proses pembangunan infrastruktur yang dilakukan terdapat upaya-upaya yang diusahakan oleh pemerintah.

1. Upaya Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

a. Upaya Pembangunan Fisik Pedesaan

Suatu pembangunan infrastruktur tidak bisa lepas dari upaya pembangunan fisik, karena merupakan bukti nyata dari sebuah usaha yang telah dilakukan. Karena tanpa upaya fisik, maka dalam suatu pembangunan boleh dikatakan tidak berhasil dan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tuban tidak akan berjalan dengan lancar. Hal tersebut juga perlu didukung dengan keaktifan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembangunan. Upaya yang dilakukan tersebut yaitu perbaikan jalan, jembatan, rumah warga, drainase dan sanitasi Desa Jenu.

b. Upaya Pembangunan Non Fisik di Pedesaan

Jika dalam upaya fisik hal yang ditekankan pembangunan yang bersifat nyata atau terlihat, atau berwujud bangunan jadi contohnya jalan, jembatan dan lain sebagainya. Akan tetapi jika upaya non fisik lebih menekankan pada faktor manusia sebagai pelaku pembangunan, seperti kegiatan musyawarah atau rapat desa. Karena dalam suatu pembangunan diperlukan peran aktif dari masyarakat, bukan dari pemerintah saja. Langkah-langkah non fisik dalam pembangunan misalnya dengan melakukan penyuluhan atau melakukan sosialisasi tentang program-program dinas. Sasaran dalam pembangunan infrastruktur pedesaan sasaran dari pembangunan pedesaan antara lain :

- *Jalan.* Jalan merupakan faktor yang sangat penting dan berpengaruh di dalam suatu wilayah, dimana masyarakatnya melakukan aktifitas ekonomi. Karena jalan merupakan penghubung antara suatu wilayah ke wilayah lain. Oleh sebab itu jika kondisi jalan suatu wilayah baik, maka akan mendukung kegiatan dan dapat memperlancar kegiatan ekonomi masyarakatnya. Namun jika suatu wilayah kondisi jalan kurang baik dan banyak yang berlubang maka akan mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat tersebut. Desa Jenu memiliki beberapa prasarana jalan yang rusak dan perlu untuk dibangun atau diperbaiki. Jalan yang setiap hari digunakan oleh warga masyarakat Desa Jenu untuk melakukan aktifitas pertanian khususnya, tidak mendukung keberadaannya. Selain keadaan jalan desa yang rusak, di Desa Jenu juga masih banyak jalan lingkungan yang tidak layak dan belum di aspal. Jika

waktu musim kemarau kondisi jalan masih bisa untuk dilewai, namun jika musim hujan keadaan jalan sangat sulit karena licin dan tergenang air.

- *Jembatan.* Selain infrastruktur jalan jembatan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan prasarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah memfasilitasi dalam hal membantu penyediaan infrastruktur jembatan di setiap wilayah khususnya pelosok desa. Hal ini sangat membantu karena di daerah pedesaan biasanya masih terisolir dan membutuhkan sarana penghubung seperti jembatan untuk melakukan aktifitas sehari-hari.
- *Sumber Daya Air.* Suatu wilayah mempunyai ketersediaan air yang cukup akan membantu kegiatan masyarakatnya diberbagai bidang. Misalnya untuk kegiatan irigasi, sanitasi, dan sumber untuk air minum. Untuk kondisi air di Desa Jenu boleh dikatakan cukup dan bersih. Karena Desa Jenu dilewati oleh dua sungai dan memiliki beberapa mata air. Walaupun rata-rata setiap warga memperoleh pasokan air bersih dari saluran perpipaan yang dibuat oleh warga yang diambil dari sumber mata air.
- *Pasar Tradisional.* Pasar berfungsi sebagai tempat tersedia kesempatan bagi masing-masing petani pengusaha untuk menjual hasil panennya dan membeli sarana produksi dan alat-alat pertanian yang dibutuhkan. Untuk dapat menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut setiap daerah pedesaan terpencil perlu mempunyai satu pusat pasar, sebab akan terlalu menyusahkan bagi petani apabila harus melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk memperoleh sarana produksi dan melakukan perjalanan lain lagi untuk memperoleh kredit. Keadaan pasar di Desa Jenu masih dapat dikatakan layak, pasar lokal berada di lokasi ibukota kecamatan yang padat kegiatan ekonominya. Namun termasuk dalam jarak yang jauh dari desa Jenu yang diteliti. Pasar tradisional kini mulai kalah dengan minimarket atau toko serba ada
- *Drainase.* Infrastruktur suatu desa tidak dapat dikatakan lengkap bila belum terdapat drainase. Walaupun suatu desa dikatakan maju sekalipun apabila tidak ada saluran pembuangan air yang memadai maka desa tersebut akan

mengalami suatu permasalahan. Drainase sangat dibutuhkan karena apabila pada waktu hujan air bisa mengalir dan tidak menyebabkan banjir. Rata-rata desa yang tidak mempunyai drainase yang baik sering mengalami banjir atau jalan yang dipenuhi air. Meskipun Desa Jenu terletak di daerah dataran rendah yang berada berdekatan dengan laut, namun drainase yang baik tetap dibutuhkan sebagai saluran pembuangan air.

- *Sanitasi*. Kebutuhan akan sarana MCK untuk desa miskin biasanya sangat penting, kecuali desa tersebut mempunyai sarana air bersih yang cukup memadai dan setiap warganya rata-rata mempunyai sumur sendiri. Untuk sarana MCK di Desa Jenu juga masih sangat kurang layak. Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki MCK sendiri dan masih banyak yang menggunakan sungai sebagai sarana MCK. Selain itu banyaknya warga yang tidak mampu untuk membuat sumur gali dan saluran air perpipaan, hal tersebut menjadi faktor utama dalam pembangunan sanitasi.

2. Persepsi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur pedesaan

Secara umum, persepsi adalah proses internal kita memilih mengevaluasi dan mengorganisasikan stimuli dan lingkungan kita. Sebuah pembangunan di negara demokrasi tidak akan berjalan dengan lancar apabila pemerintahan saja yang menjadi aktor tunggal yang melaksanakan, oleh karena itu peran masyarakat sangat penting baik itu menjadi subyek dan obyek pembangunan dengan ikut langsung berpartisipasi melalui musyawarah yang dilakukan bersama pemerintah desa atau saat berswadaya dalam ikut mensukseskan pembangunan. Akan tetapi pemerintah juga secara tidak langsung juga bisa melihat keinginan masyarakat dalam pembangunan melalui persepsi. Persepsi masyarakat tidak langsung mengutarakan apa yang dibutuhkan, diinginkan dan yang menjadi keluhan. Persepsi masyarakat desa Jenu khususnya petani terkait pembangunan infrastruktur yang selama ini sudah dibangun sangat beraneka ragam. Masyarakat desa Jenu rata-rata mengeluhkan kondisi jalan desa yang keadaannya sudah banyak mengalami kerusakan bahkan masih banyak yang belum di aspal.

3. Tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat
 - a. *Pemerataan pendapatan.* Salah satu faktor kesejahteraan adalah pemerataan pendapatan setiap warganya. Jika suatu wilayah mempunyai pendapatan rata-rata tinggi atau minimal mampu mencapai upah minimum regional maka daerah tersebut dikatakan sejahtera dibidang pendapatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh jenis pekerjaan masyarakatnya jika masyarakat memiliki pekerjaan yang layak dan mampu mencapai upah minimum setiap bulan. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Karena Desa Jenu memiliki potensi dibidang pertanian, maka masyarakat sebagian besar bekerja sebagai petani atau pemilik lahan pertanian. Untuk masyarakat yang menjadi petani, pendapatan per bulan tidak menentu tergantung dengan hasil panen yang didapatkan.
 - b. *Pendidikan yang semakin mudah dijangkau.* Pemerintah pusat sampai pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan baik sarana dan prasarana pendidikan maupun tenaga pengajar. Maka dari itu program wajib belajar 9 tahun yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah selama ini menjadi semangat dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Warga masyarakat Jenu di jaman yang sudah maju ini mampu melaksanakan wajib belajar 9 tahun yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Banyak pelajar yang sudah sadar akan kebutuhan pendidikan bagi dirinya.
 - c. *Kualitas kesehatan.* Kesehatan masyarakat dapat tercapai dengan cara melakukan pola hidup sehat, asupan gizi yang cukup, tersedianya prasarana kesehatan seperti posyandu dan tenaga medis. Namun di daerah desa miskin atau terpencil untuk mewujudkan masyarakat yang sehat sangat sulit karena keterbatasan faktor prasarana yang kurang serta rendahnya kesadaran masyarakat yang sakit untuk melakukan pengobatan di posyandu atau puskesmas terdekat.
 - d. *Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai.* Adanya infrastruktur yang memadai sangat membantu untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang sangat berpengaruh contohnya jalan, jembatan, pasar, dan lain-lain. Oleh sebab itu keberadaan infrastruktur

sangat dibutuhkan oleh masyarakat apalagi yang berada jauh dari pusat kota karena menjadi sarana penunjang bagi pertumbuhan ekonomi.

Dampak dari kegiatan pembangunan dapat merambat ke semua aspek kehidupan yang ada di masyarakat mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial ataupun budaya dan pertahanan keamanan. Baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Jika ditelusuri, kaitan program, hasil, tujuan dan dampak dari kegiatan pembangunan adalah:

a. Pembangunan Jalan

- Program : pembangunan jalan utama desa
- Hasil (*output*) : jalan dibangun aspal hitam sepanjang jalan di dalam desa jenu
- Tujuan (*goals*) : memperlancar proses distribusi pertanian dan kegiatan ekonomi produksi, memperlancar akses ekonomi petani
- Dampak (*impact*) : proses produksi cepat dan lancar, pendapatan petani meningkat, motivasi kerja meningkat, lancar akses ke lokasi publik, pendapatan petani meningkat, daya beli meningkat, kebiasaan mengkonsumsi meningkat.

b. Pembangunan Jembatan

- Program : pembangunan jembatan desa
- Hasil (*output*) : perbaikan jembatan penghubung desa dari jembatan kayu menjadi jembatan beton dan aspal
- Tujuan (*goals*) : memperlancar proses distribusi pertanian dan kegiatan ekonomi produksi, memperlancar akses ekonomi petani, mempermudah proses pemasaran ke desa lain, sebagai penghubung antar desa
- Dampak (*impact*) : proses produksi cepat dan lancar, pendapatan petani meningkat, motivasi kerja meningkat, lancar akses ke lokasi publik, lancarnya akses ke desa lain, daya beli meningkat, kebiasaan mengkonsumsi meningkat.

c. Pembangunan dan Perbaikan Sumber Daya Air

- Program : pembangunan dan perbaikan sumber daya air
- Hasil (*output*) : pembuatan perpipaan sumber daya air, baik perbaikan sumur atau pembuatan PDAM di rumah warga

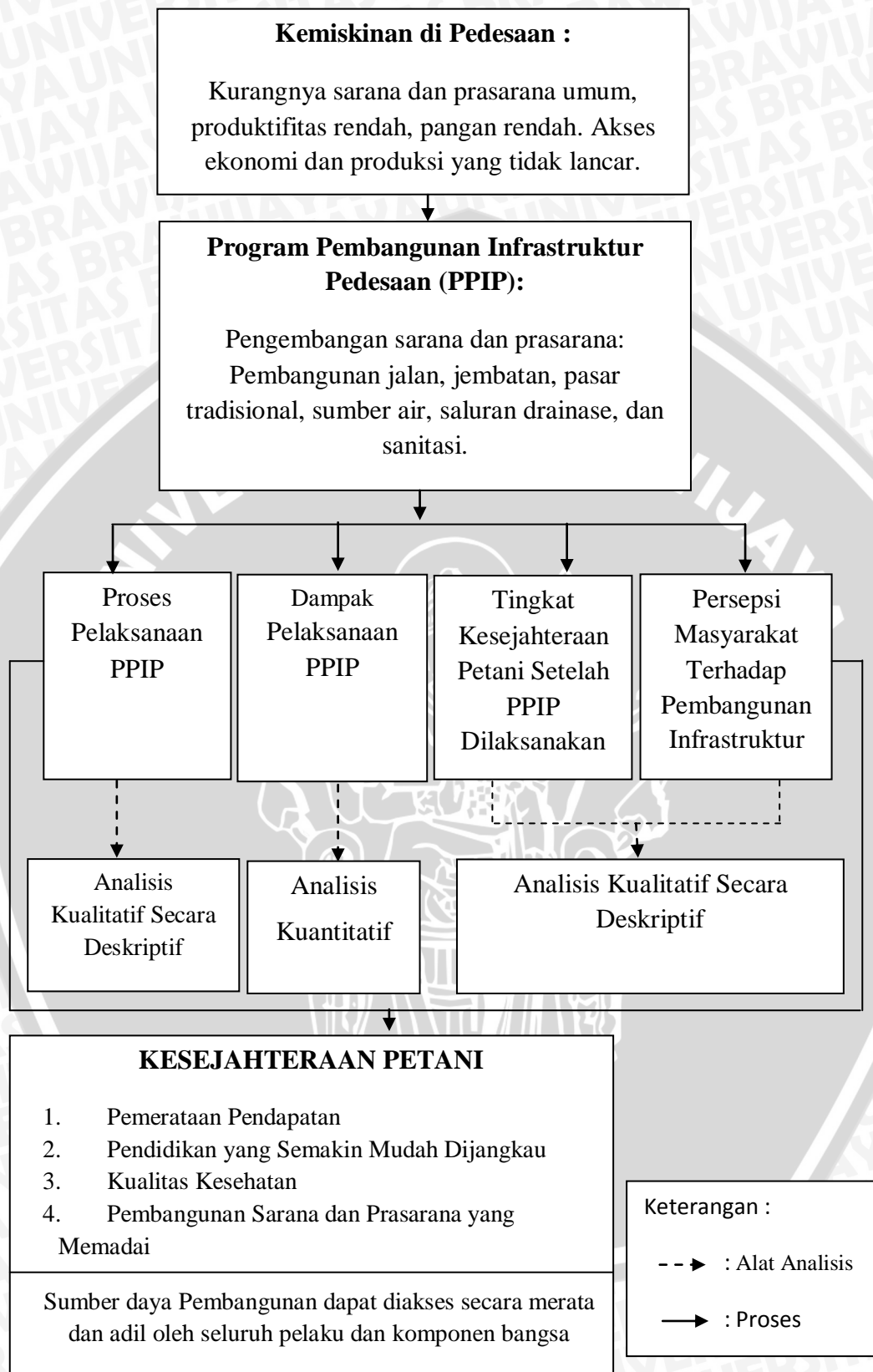
- Tujuan (*goals*) : dapat meningkatkan kesehatan warga, dan mencukupi kebutuhan air minum dan air bersih
- Dampak (*impact*) : ketersediaan air bersih yang cukup, membantu kegiatan keluarga petani diberbagai bidang seperti irigasi, sanitasi dan sumber untuk air minum.

d. Pembangunan Saluran Drainase dan Irigasi

- Program : pembangunan saluran pembuangan drainase dan saluran irigasi desa
- Hasil (*output*) : penggalian saluran drainase dan irigasi di sisi jalan dan di lahan pertanian sedalam ± 50 cm.
- Tujuan (*goals*) : memperlancar pembuangan air, penampung air hujan, dapat meningkatkan produksi pertanian
- Dampak (*impact*) : aliran air lancar, produksi pertanian meningkat, pendapatan petani meningkat, daya beli meningkat, kebiasaan mengkonsumsi berubah.

e. Perbaikan Sanitasi atau MCK

- Program : perbaikan sanitasi atau sarana MCK
- Hasil (*output*) : pembuatan bak mandi dan kakus pada rumah petani dan keluarga yang tidak layak pakai
- Tujuan (*goals*) : dapat terlindung dari penyakit, dapat meningkatkan motivasi hidup sehat, mengurangi pencemaran sungai sebagai pengganti sanitasi dan MCK
- Dampak (*impact*) : kualitas kesehatan meningkat, pemerataan strata sosial dalam masyarakat, tingkat stress rendah, lingkungan aman dan terjaga dari pencemaran, daya beli sarana pelengkap kebersihan dan kesehatan meningkat



Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir Dampak Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani

3.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian cakupan masalah dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban
2. Dampak pembangunan infrastruktur pedesaan yang telah dilaksanakan meliputi : jalan, jembatan, sumber daya air, rumah warga, drainase, sanitasi.
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat desa Jenu dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat, yang meliputi :
 - a. Jumlah dan pemerataan pendapatan,
 - b. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau,
 - c. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata,
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai,

2.8 Definisi Operasional

1. Pembangunan infrastruktur pedesaan adalah upaya pembangunan dan atau perbaikan sarana prasarana dan fasilitas di pedesaan dengan tujuan sebagai sarana dan prasarana pendukung ekonomi oleh pemerintah atau pihak lain atau masyarakat itu sendiri.
2. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) adalah program lanjutan dari Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dikeluarkan dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan pada masyarakat pedesaan. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan ini dilaksanakan di Desa Jenu dengan kegiatannya meliputi : pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, pasar tradisional, drainase dan sanitasi.
3. Dampak merupakan akibat dari suatu kegiatan yang memberikan akibat positif atau negatif.
4. Persepsi adalah proses internal dalam memilih mengevaluasi dan mengorganisasikan stimuli dan lingkungan serta pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
5. Kesejahteraan adalah suatu keadaan dalam masyarakat atau dalam lingkup rumah tangga adalah keluarga yang kebutuhan pokoknya sehari-hari terpenuhi.

6. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam suatu wilayah dan terikat oleh suatu kehidupan yang mereka anggap sama. Masyarakat yang dimaksud adalah anggota populasi sebagai petani yang tergabung dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Jenu.

3.4 Pengukuran Variabel

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala ordinal. Variabel ordinal digunakan untuk mengurutkn peringkat dari objek yang diukur. Berdasarkan penelitian ini yang dapat dibandingkan hanyalah nilai tersebut lebih tinggi, sama, atau lebih rendah dari pada nilai yang lain, namun tidak dapat mengetahui perbedaan jarak (interval) di antara nilai-nilai tersebut.

3.4.1 Pengukuran Variabel Kesejahteraan Masyarakat Sebelum Adanya Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIPP):

I. Pendapatan

- | | |
|---|---|
| 1. Sumber Pendapatan | |
| a. Berasal dari pertanian dan luar pertanian. | 3 |
| b. Berasal dari pertanian saja. | 2 |
| c. Berasal dari luar pertanian saja. | 1 |
| 2. Jumlah Pendapatan Per Bulan | |
| a. Lebih dari Rp 2.000.000,00. | 3 |
| b. Rp 1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00. | 2 |
| c. < Rp 1.000.000,00. | 1 |
| 3. Jumlah Penjualan | |
| a. Lebih dari Rp 2.000.000,00. | 3 |
| b. Rp 1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00. | 2 |
| c. < Rp 1.000.000,00. | 1 |

II. Pendidikan

- | | |
|--|---|
| a. Semua anak usia sekolah bersekolah. | 3 |
| b. Ada anak usia sekolah tidak bersekolah. | 2 |
| c. Semua anak usia sekolah tidak bersekolah. | 1 |

III. Kesehatan

- | | |
|--|---|
| a. Bila anggota keluarga sakit dibawa ke puskesmas atau dokter. | 3 |
| b. Bila anggota keluarga sakit diberikan obat yang dijual bebas. | 2 |

- c. Bila anggota keluarga sakit diobati dengan obat tradisional/dukun. 1

IV. Air bersih dan sarana kesehatan (MCK)

- a. Memiliki air bersih dan MCK sendiri. 3
 b. Memiliki air bersih dan MCK milik umum. 2
 c. Tidak terdapat air bersih dan MCK atau salah satunya. 1

3.4.2 Pengukuran Variabel Kesejahteraan Masyarakat Sebelum Adanya Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP):

I. Pendapatan

1. Sumber Pendapatan
 a. Berasal dari pertanian dan luar pertanian. 3
 b. Berasal dari pertanian saja. 2
 c. Berasal dari luar pertanian saja. 1
 2. Jumlah Pendapatan Per Bulan
 d. Lebih dari Rp 2.000.000,00. 3
 e. Rp 1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00. 2
 f. < Rp 1.000.000,00. 1
 4. Jumlah Penjualan
 d. Lebih dari Rp 2.000.000,00. 3
 e. Rp 1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00. 2
 a. < Rp 1.000.000,00. 1

II. Pendidikan

- a. Semua anak usia sekolah bersekolah. 3
 b. Ada anak usia sekolah tidak bersekolah. 2
 c. Semua anak usia sekolah tidak bersekolah. 1

III. Kesehatan

- a. Bila anggota keluarga sakit dibawa ke puskesmas atau dokter. 3
 b. Bila anggota keluarga sakit diberikan obat yang dijual bebas. 2
 c. Bila anggota keluarga sakit diobati dengan obat tradisional/dukun. 1

IV. Air bersih dan sarana kesehatan (MCK)

- a. Memiliki air bersih dan MCK sendiri. 3
 b. Memiliki air bersih dan MCK milik umum. 2
 c. Tidak terdapat air bersih dan MCK atau salah satunya. 1

IV. METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian adalah metode gabungan yang merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau dalam pendekatan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode ilmiah mengandung dua unsur penting yakni pengamatan (*observation*) dan penalaran (*reasoning*). Rancangan metodologi gabungan (*mixed methodology design*) peneliti menggabungkan aspek-aspek paradigma kualitatif dan kuantitatif pada seluruh atau sebagian dari langkah-langkahnya (Aminudin, 2007).

4.2 Metode Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi berkaitan dengan tempat yang dipilih sebagai objek penelitian dan dipilih secara *purposive* dan dilakukan pada bulan April sampai Mei 2015. Dalam penelitian ini, lokasi yang ditetapkan adalah Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

1. Kecamatan Jenu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tuban yang tergolong sebagai Kecamatan miskin yang melaksanakan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.
2. Kecamatan Jenu sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani yang merupakan objek utama dalam penelitian ini.
3. Adanya peran serta masyarakat Kecamatan Jenu dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang nilai baik guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program ini, sehingga peneliti ingin memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan dukungan masyarakat di Kecamatan Jenu.
4. Jumlah sampel di tempat tersebut memenuhi kebutuhan analisis yang dibutuhkan.
5. Mempertimbangkan biaya dan waktu penelitian.

4.3 Metode Penentuan Informan dan Responden

Penarikan sampel dilakukan dengan rumus *Slovin*. Teknik pengambilan responden ini adalah dengan menghitung jumlah responden yang dibutuhkan dari jumlah populasi petani yang ada di Desa Jenu. Pertimbangan pemilihan daerah tersebut mendapatkan bantuan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP), yang dalam programnya melakukan pembangunan fasilitas umum, perbaikan fasilitas yang tidak memadai, perbaikan jalan atau akses ekonomi dan fasilitas pendukung pertanian. Menurut Mantra (2008), adapun informan dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* yang dipilih peneliti secara cermat dan individu yang memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti Kepala Desa, Ketua RT, Ketua Gapoktan, tokoh masyarakat (sebagai petani). Sedangkan responden dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik sampling *Probability Sample* (sampel kesempatan) dengan Pengambilan Sampel Acak Sederhana (Simple Random Sampling) (Adimihardja, 1995). Penentuan jumlah responden yang dicari digunakan rumus *Slovin* untuk menentukan jumlah sampel yang dapat diwawancarai (Sevilla, 1993), yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

$$n = \frac{205 \text{ orang}}{1 + 205 \text{ orang}(0,15^2)} = 36,52561$$

$$= 37 \text{ orang}$$

Objek penelitian ini adalah Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Penelitian ini pengambilan jumlah sampel responden dihitung dengan *Slovin* sebanyak 37 responden. Jumlah populasi hanya diteliti dari seluruh petani di Desa Jenu dusun Jenu dan dusun Kejenon sebanyak 205 orang dari 2 Gapoktan dengan rincian 97 orang Tani Mulyo dan 108 orang dari Gapoktan Tani Sehat.

4.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data yang diteliti. Penggunaan metode sesuai dengan jenis data yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik-teknik penelitian sosial, hal ini dikarenakan bentuknya yang berasal dari

interaksi verbal antara peneliti dengan responden. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau suatu komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran serta perasaannya dengan tepat. Peneliti dalam melakukan wawancara yaitu melibatkan obyek penelitian secara langsung, yang menjadi responden atau yang diwawancarai yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban
- b. Petani desa yang mengikuti kegiatan PPIP di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Hal tersebut adalah pengamatan langsung. Di dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang. Dokumentasi merupakan objek perolehan informasi dengan memperhatikan tiga macam sumber yaitu tulisan (*paper*), tempat (*place*), dan kertas atau orang (*people*). Dimaksudkan untuk mendapatkan data-data tentang pengelolaan PPIP di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

4.5 Metode Analisis Data

Variabel yang dianalisa adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan. Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. “Langkah-langkah menganalisa data setelah dibaca,

dipelajari, dan ditelaah, yaitu mengadakan reduksi data, menyusun dalam satuan-satuan, dikategorisasikan, dan mengadakan pemeriksaan keabsahan data” (Moleong, 2006).

4.5.1 Analisis Proses Pelaksanaan PPIP

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan pendekatan metode penelitian yang digunakan. Proses pelaksanaan PPIP dipakai analisis kualitatif secara deskriptif. Teknik analisis kualitatif merupakan teknik analisis yang mentransformasikan data mentah ke dalam bentuk data yang mudah dimengerti dan ditafsirkan, serta menyusun, memanipulasi dan menyajikan data menjadi informasi yang jelas.

Pengkajian proses pelaksanaan PPIP dilakukan dengan cara mendeskripsikan proses pelaksanaan PPIP berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan pelaku PPIP atau data yang tersedia di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Kemudian dideskripsikan secara jelas sesuai data dan informasi yang diperoleh. Data yang dibutuhkan berupa input PPIP, proses PPIP, output yang dihasilkan, dan outcome yang diperoleh nantinya setelah PPIP dilaksanakan.

4.5.2 Evaluasi Dampak PPIP

Fokus permasalahan ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Data yang didapatkan dianalisis secara statistik, dimana dari setiap jawaban variabel yang ada diberikan skor atau penilaian dengan tujuan mempermudah perhitungan tingkatan dari variabel tersebut. Metode yang digunakan untuk evaluasi dampak program PPIP adalah metode *Before and After Comparisons* atau metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya. Menurut permasalahan yang diteliti, maka untuk menentukan kriteria tingkat kesejahteraan petani di Desa Jenu digunakan sistem skoring meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Penentuan banyak selang kelas

Selang kelas yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu :

- a. Skor 1 = rendah
- b. Skor 2 = sedang

c. Skor 3 = tinggi

2. Menentukan kisaran

Kisaran merupakan nilai pengamatan tertinggi dengan nilai terendah.

$$R = X_t - X_r \quad \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

R = Kisaran

X_t = Nilai pengamatan tertinggi

X_r = Nilai pengamatan terendah

Total nilai kisaran data untuk tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa

Jenu

$$R = 18 - 6 \\ = 12$$

3. Pembuatan selang kelas

$$I = \frac{R}{K} \quad \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan :

I = Selang dalam kelas

R = Kisaran

K = Jumlah kelas

Selang kelas kisaran data untuk tingkat kesejahteraan petani di Desa Jenu

$$I = \frac{12}{3} = 4$$

Untuk variabel kesejahteraan petani memiliki kisaran nilai sebagai berikut :

$$X_t = 18$$

$$X_r = 6 \qquad R = 18 - 6 = 12$$

$$K = 3 \qquad I = 12/3 = 4$$

Dari perhitungan selang kelas maka didapatkan kisaran nilai untuk masing-masing kelas yaitu :

1. Kesejahteraan petani tinggi = 14,2 – 18 atau 78,52% - 100%
2. Kesejahteraan petani sedang = 10,1 – 14,1 atau 55,92% - 78,15%
3. Kesejahteraan petani rendah = 6 – 10 atau 33,33% - 55,56%



Sedangkan untuk menghitung pendapatan petani menggunakan rumus:

$$p = TR - TC$$

Keterangan:

II : Pendapatan Usahatani

TR : Penerimaan

TC : Penjualan

$$TR = P \times Q$$

Keterangan :

TR : Total Revenue (pendapatan total petani)

P : Price (harga pokok per kg)

Q : Quantitas (jumlah produk)

$$TC = FC + VC$$

Keterangan :

TC : Total Biaya (Rp/Ut)

FC : Biaya Tetap (Rp/Ut)

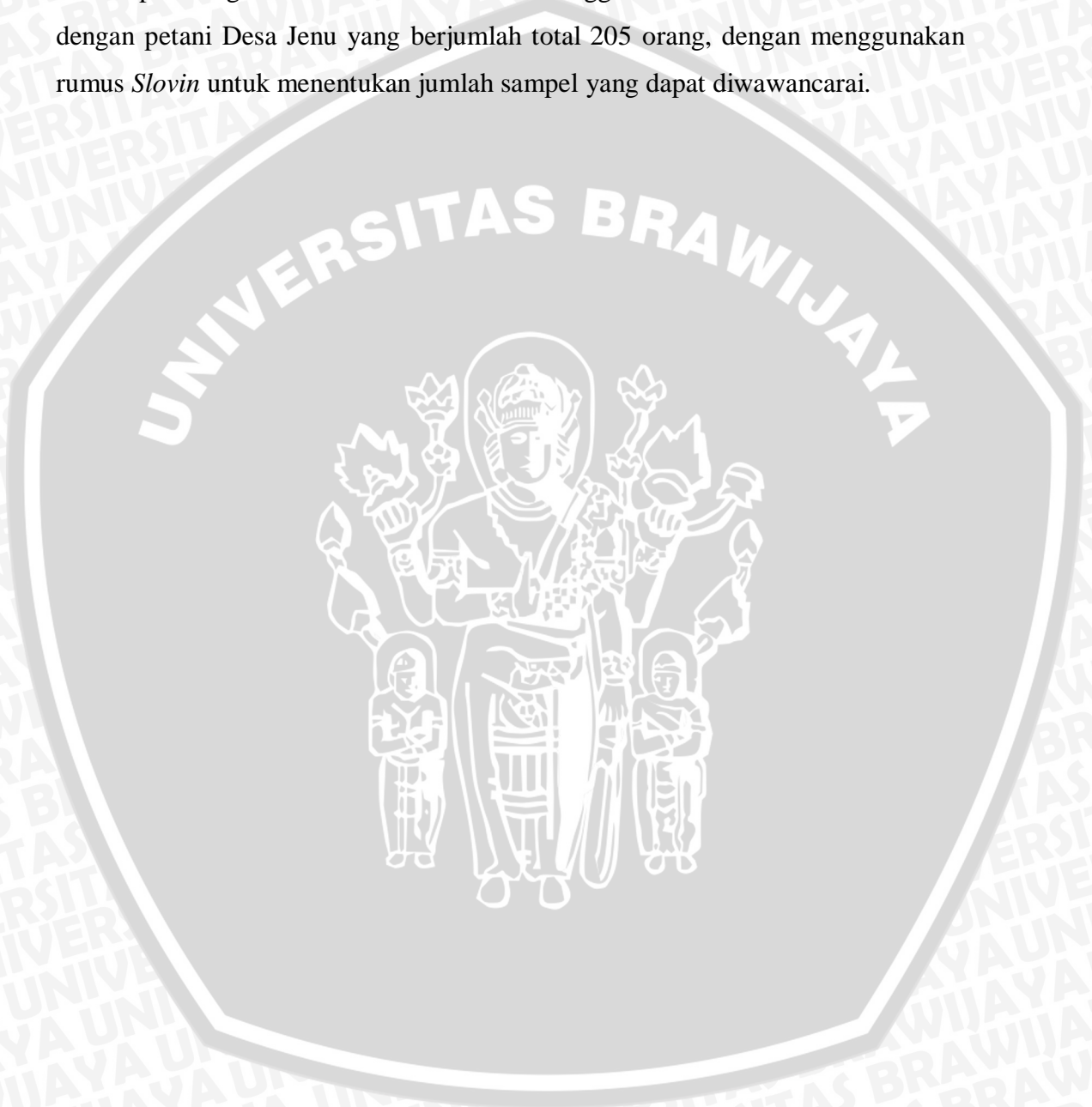
VC : Biaya Variabel (Rp/Ut)

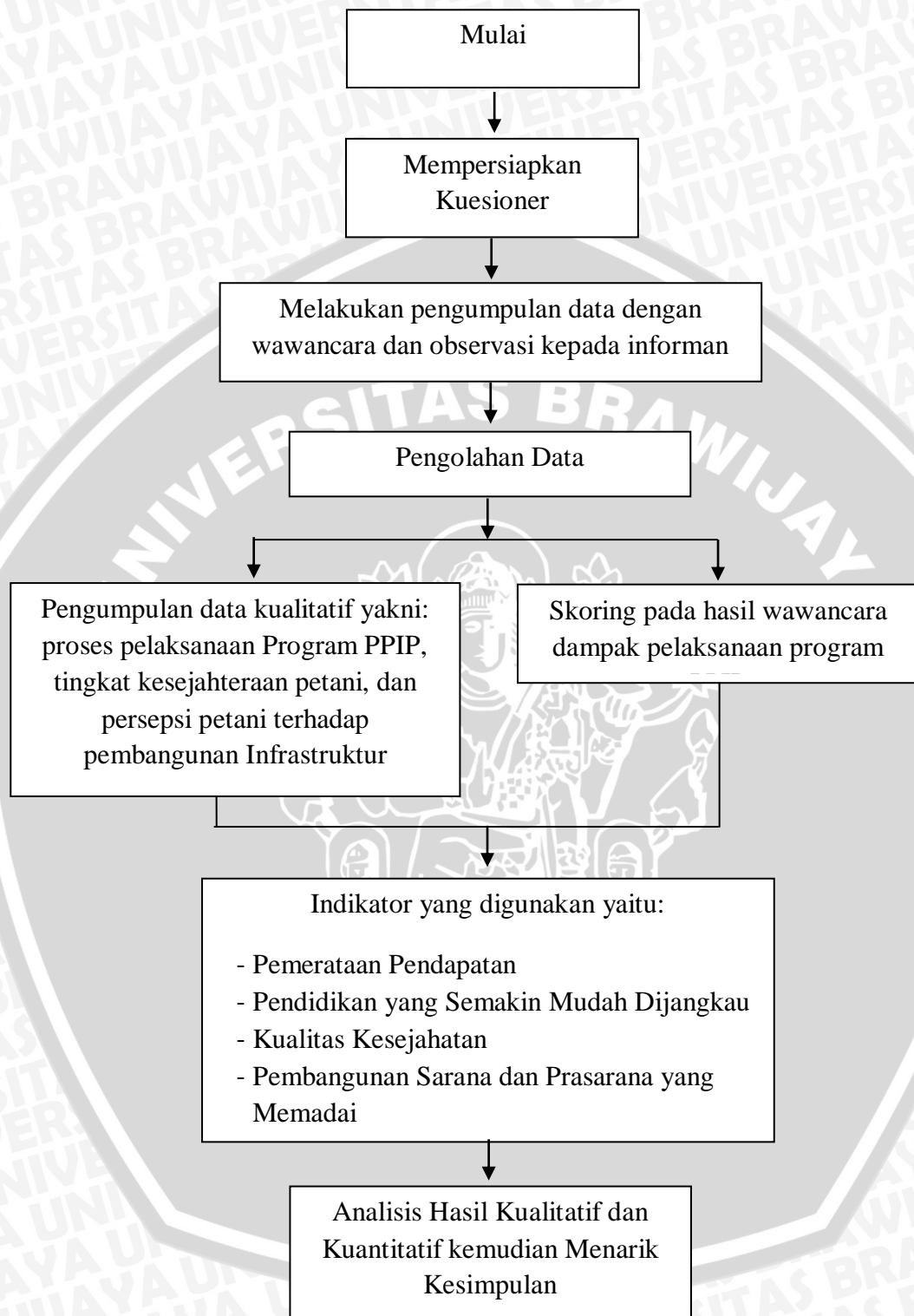
4.5.3 Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani Setelah PPIP

Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisisnya berhubungan dengan perhitungan analisis pada dampak pelaksanaan PPIP yaitu tingkat kesejahteraan petani setelah program PPIP dilaksanakan dan dikaji berdasarkan indikator kesejahteraan yang digunakan yaitu pemerataan pendapatan, pendidikan yang semakin mudah dijangkau, kualitas kesehatan dan pembangunan sarana prasarana yang memadai (jalan, jembatan, pasar, sumber air bersih, drainase dan sanitasi). Tingkat kesejahteraan dilihat melalui indikator yang digunakan dilakukan dengan cara mendeskripsikan jawaban responden berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan petani di Desa Jenu.

4.5.4 Analisis Persepsi Petani terhadap PPIP

Analisis ini menyangkut persepsi para responden yaitu petani yang dibuat dengan analisis kualitatif secara deskriptif. Analisis tersebut meliputi perkembangan desa, infrastruktur desa, pelaksanaan PPIP, serta partisipasi mereka dalam pembangunan desa. Analisis ini menggunakan wawancara mendalam dengan petani Desa Jenu yang berjumlah total 205 orang, dengan menggunakan rumus *Slovin* untuk menentukan jumlah sampel yang dapat diwawancarai.





Gambar 2. Diagram Alir Metode Penelitian

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Profil Desa Jenu

5.1.1 Kondisi Desa

1. Sejarah Desa Jenu

Sejarah tentang asal Desa Jenu tidak diketahui secara pasti. Sehingga kami melakukan pendekatan dengan sejarah asal mula daerah Tuban. Dimana menurut Drs. Soekarto, bahwa di daerah Tuban banyak terdapat tanaman *tuba* (racun ikan) yang dalam bahasa Jawa kuno disebut “**JENU**”. Dimana tempat yang banyak terdapat tanaman tersebut terletak di sebelah Barat Tuban. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa tempat yang dimaksud diatas adalah daerah Jenu (sekarang).

Bukti bahwa terdapatnya kehidupan bermasyarakat sejak masa lampau di desa Jenu yaitu terdapat banyaknya makam – makam tua (para auliya’), diantaranya Syeikh Syamsudin Al Arif, Syeikh Korowelang, Trem Abdurrosyad, Sayyid Abdurrohman, Mbah Buyut Kemuning, serta masih banyak lagi petilasan – petilasan tua yang terdapat di Desa Jenu. Hal ini membuktikan bahwa daerah itu (Jenu) telah didiami masyarakat sejak masa lampau. Bahkan terdapat penemuan purbakala berupa fosil cula badak purba yang sekarang tersimpan di Museum Kambang Putih Tuban yang diduga ditemukan di Jenu (belum pasti tempatnya). Hal ini sebagai bukti bahwa pada zaman purba pun daerah Jenu telah dihuni beberapa binatang purba.

2. Sejarah Pemerintahan Desa Jenu

Pada zaman kerajaan, Jenu diduga sebagai salah satu bagian dari Kadipaten Tuban. Dimana pada saat itu suatu desa dipimpin oleh seorang Lurah/Petinggi. Namun tidak diketahui secara pasti siapa yang menjabat sebagai Lurah Jenu yang pertama.

Seiring dengan perkembangan zaman, pada masa penjajahan Belanda, Kabupaten Tuban terbagi atas beberapa Kecamatan, di antaranya adalah Kecamatan Jenu. Sedangkan Ibu Kota pemerintahannya terletak di Desa Jenu (sekarang pertigaan Koramil lama). Desa Jenu merupakan gabungan antara dua dusun, yaitu dusun Krajan (sekarang dusun Jenu) sebagai ibu kota pemerintahan Desa, dan dusun Kejenon sebagai dukuhan.

Tercatat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, desa Jenu dipimpin oleh seorang Petinggi (Kepala Desa), yang dalam tugasnya dibantu oleh Carik (Sekdes), Kebayan, Jogoboyo, Modin, serta kamituo sebagai kepala wilayah dusun. Sejak terbentuknya Desa Jenu, telah mengalami pergantian kepemimpinan (Kepala Desa), dimana tidak diketahui secara pasti siapa Kepala Desa yang pertama seperti yang telah disebutkan di atas namun menurut para sesepuh desa yang masih hidup, desa Jenu telah dipimpin sebagai berikut :

- a. SARMIDJAN, masa penjajahan Belanda
- b. WARSILAN, masa penjajahan sampai dengan tahun 1952
- c. H. KARSIMIN, tahun 1952 sampai tahun 1989
- d. M. YASIR (PJ. Kepala Desa), tahun 1989
- e. H. IMAM SUHARNO, tahun 1990 sampai tahun 1998
- f. M. YASIR (PJ. Kepala Desa), tahun 1998
- g. HASAN (periode I), tahun 1999 sampai tahun 2007
- h. M. KHOLIK (PJ. Kepala Desa), tahun 2007
- i. HASAN (periode II), tahun 2007 sampai tahun 2013
- j. TUTIK, tahun 2013 sampai sekarang (2015)

3. Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2013, jumlah penduduk desa Jenu adalah terdiri dari 423 KK. Jumlah total penduduk 1.775 jiwa yang tersebar di 2 dusun yaitu dusun Jenu dan dusun Kejenon. Rincian penduduk laki-laki sebanyak 925 dan 850 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel 1:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	0 – 5	84	61	145	8,20
2	6 – 10	90	55	145	8,20
3	11 – 15	68	80	148	8,30
4	16 – 20	93	78	171	9,60
5	21 – 25	69	57	126	7,10
6	26 – 30	85	80	165	9,30
7	31 – 35	73	70	143	8,10
8	36 – 40	67	77	144	8,10
9	41 – 45	74	68	142	8,00
10	46 – 50	66	70	136	7,70
11	51 – 55	68	54	122	6,90
12	56 – 60	34	21	55	3,10
13	➤ 60	54	79	133	7,50
Jumlah Total		925	850	1.775	100

Sumber data primer RPJM Desa 2014

Dari data di atas dapat dilihat bahwa penduduk usia produktif pada usia 20 – 49 tahun desa Jenu sekitar 856 atau hampir 48,2 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM di desa Jenu. Dari jumlah 468 KK di atas, sejumlah 150 KK tercatat sebagai pra sejahtera, 188 KK tercatat keluarga sejahtera I; 87 KK tercatat keluarga sejahtera II; 41 KK tercatat keluarga sejahtera III; 2 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK Golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 50 % KK Desa Jenu adalah keluarga miskin.

Secara Topografi ketinggian desa Jenu adalah berupa dataran rendah yaitu sekitar 0-4 m di atas permukaan air laut. Terletak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban memiliki luas administrasi 238,83 Ha. Secara administratif, Desa Jenu terletak di wilayah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dengan batas – batas sebagai berikut.

- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- b. Di sebelah Barat berbatasan dengan desa Beji, Jenggolo dan Sekardadi
- c. Di sebelah Selatan berbatasan dengan desa Sumberjo Kec. Merakurak
- d. Di sebelah Timur berbatasan dengan desa Sugiharwas

Kondisi geografis desa Jenu yaitu ketinggian tanah dari permukaan laut adalah 1-5 meter. Banyaknya curah hujan sekitar 14.2 mm/tahun. Topografi desa Jenu termasuk dalam dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 30⁰ C.

Jarak tempuh desa Jenu ke ibu kota kecamatan adalah 2 km, yang dapat ditempuh dengan waktu 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 8 km, yang dapat di tempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Pola pembangunan lahan di desa Jenu lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawija (padi, kedelai, jagung) dengan penggunaan pengairan irigasi.

Aktifitas mobilitas di desa Jenu cukup tinggi. Khususnya mobilitas angkutan hasil-hasil pertanian maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu juga didukung fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan berupa Polindes yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Namun demikian masih banyak permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan remaja. Hal tersebut terjadi karena keberadaan potensi yang ada di desa kurang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang memenuhi, misalnya keberadaan lahan pertanian yang luas di Desa Jenu tidak bisa mengangkat derajat hidup petani karena produktifitas pertaniannya tidak maksimal bahkan relatif rendah. Hal tersebut disebabkan karena sering terjadinya banjir, sumberdaya para petani baik yang berupa modal maupun pengetahuan tentang sistem modern yang relatif masih kurang. Akibatnya banyak masyarakat petani yang taraf hidupnya masih dibawah garis kemiskinan.

a. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tumbuhnya tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Persentase tingkat pendidikan desa Jenu dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Pendidikan Terakhir Masyarakat Desa Jenu

No	Keterampilan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pra sekolah	195 org	11
2	Masih sekolah (pelajar/mahasiswa)	340 org	19
3	Tidak tamat SD	175 org	10
4	Tamat sekolah SD	382 org	22
5	Tamat sekolah SMP	255 org	14
6	Tamat sekoah SMA	314 org	18
7	Tamat sekolah PT/Akademik	66 org	4
8	Buta huruf	48 org	3
Jumlah		1775 org	100

Sumber data primer RPJM Desa 2014

Dari data tabel 2 berdasarkan pendidikan terakhir masyarakat desa Jenu di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Jenu hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan tingkat SMA. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni masih kurang, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas pendidikan di desa Jenu tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan-pendidikan yang ada, di samping itu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di desa Jenu baru tersedia di tingkat pendidikan 12 tahun (SD, SMP dan SMA), sementara untuk pendidikan tingkat tinggi berada di Kota Kabupaten.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di desa Jenu yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di desa Jenu. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

b. Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak warga setiap masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat ke depan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan yang baik. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyak adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif rendah. Adapun penyakit yang sering di derita antara lain Influenza, *Thyfus* dan Demam Berdarah. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk

adalah penyakit yang bersifat sedang dan memiliki durasi relatif cepat bagi kesembuhannya, yang di antaranya disebabkan perubahan cuaca.

Data orang cacat mental dan fisik juga cukup rendah jumlahnya. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 0 orang, tuna wicara 1 orang, tuna rungu 4 orang, tuna netra 3 orang, dan lumpuh 8 orang. Data ini menunjukkan masih rendahnya kualitas hidup sehat di desa Jenu.

Hal ini perlu juga dipaparkan disini adalah terkait keikutsertaan masyarakat dalam KB. Terkait hal ini peserta KB aktif tahun 2013 di desa Jenu berjumlah 255 pasangan usia subur. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan polio dan DPT-1 berjumlah 31 bayi. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah polindes di desa Jenu. Maka wajar jika ketersediaan fasilitas yang relatif lengkap ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi bayi lahir. Dari 28 kasus bayi lahir pada tahun 2013, semuanya dapat dilahirkan dengan baik.

c. Keadaan Sosial

Adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Konteks politik lokal desa Jenu, tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (Pileg, Pilpres, pilukada, dan pilupub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum. Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, atas kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa.

Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, atau jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Pada bulan Juli 2013 masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Walaupun bertepatan dengan bulan Ramadhan, dimana mayoritas masyarakat pada waktu itu menunaikan ibadah puasa, namun tingkat partisipasi masyarakat dapat dikatakan mencapai 100%. Ini adalah proses demokrasi yang cukup signifikan di desa Jenu.

Di desa Jenu walau dalam kepemimpinan ada Kepala Desa, namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada melibatkan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Permusyawaratan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Maka terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah Desa Jenu mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis. Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa desa Jenu mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini dilihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi dalam minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias, hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat desa Jenu kurang mempunyai antusias. Terutama yang berkaitan dengan permasalahan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Hal kegiatan keagamaan, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kelender Jawa/Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan jawa. Semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir baik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat desa Jenu. Maka merespon tradisi lama ini telah mewadahi dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di desa Jenu. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga kerawanan dan konflik sosial.

d. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk desa Jenu Rp 1.500.000,00. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat desa Jenu dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 3. Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentasi (%)
1	Pertanian	64 orang	9
2	Jasa / Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintah	28 orang	4
	2. Jasa Perdagangan	96 orang	14
	3. Jasa Angkutan	26 orang	4
	4. Jasa Ketrampilan	17 orang	2
	5. Jasa Kependidikan	26 orang	4
3	Sektor Industri	426 orang	61
4	Sektor Perikanan dan Nelayan	18 orang	3
Jumlah		701 orang	100

Sumber data primer RPJM Desa 2014

Melihat data di atas maka angka pengangguran di desa Jenu cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20 - 55 yang belum bekerja berjumlah 31 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 1203 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di desa Jenu.

5.1.2 Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah desa Jenu terdiri dari 2 dusun yaitu: dusun Jenu dan dusun Kejenon yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Kepala Dusun terpilih melalui pemilihan kepala dusun yang dilaksanakan jika posisi tersebut lowong. Pemilihan ini hanya dilakukan pada wilayah yang menjadi wilayah administrasinya. Sedangkan yang mempunyai hak suara dalam pemilihan ini bukan seluruh penduduk di dusun itu, namun hanya Kepala Keluarga saja. Namun seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan saat ini, maka saat ini sistem pemilihan tersebut sudah tidak diberlakukan lagi, melainkan calon Kepala Dusun harus mengikuti ujian, dan yang lulus ujian dengan nilai tertinggi, maka dia yang berhak menjadi Kepala Dusun.

Maka dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di desa Jenu, dari dua dusun tersebut terbagi menjadi 3 Rukun Warga (RW) dan 7 Rukun Tetangga (RT). Ketua RT dipilih 5 (lima) tahun sekali dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode selanjutnya. Pemilihan ketua RT ini hanya

dilakukan berdasarkan wilayah administrasinya saja, dan yang memiliki hak suara hanyalah Kepala Keluarga saja.

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Keberadaan Rukun Tatangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintah desa Jenu memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat, terutama terkait hubungannya dengan pemerintah pada jenjang di atasnya. Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur pemerintahan desa Jenu tidak lepas dari struktur administratif pemerintahan pada jenjang di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA JENU KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

Tabel 4. Nama Pejabat Pemerintah Desa Jenu

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELA MIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDID IKAN
1	2	3	4	5	6
1	TUTIK	Kepala Desa	Pr	Tulungagung, 14-06-1966	SLTA
2	MOH. KHOLIK	Sekretaris Desa	LK	Tuban, 20-12-1975	SLTA
3	SUTRISNO	Kaur Umum & Pemrthn	LK	Tuban, 25-03-1988	S1
4	A.DULHADI	Kaur Eko & Keu	LK	Tuban, 16-12-1988	S1
5	AHMAD MUJIB	Kaur Pemb. & Pemb	LK	Tuban, 06-02-1991	SLTA
6	CHOIRUL FALAQ	Kasi Pertan & Pengairn	LK	Tuban, 06-02-1985	SLTA
7	WARKHAM	Kasi Trantib	LK	Tuban, 01-11-1974	SLTA
8	M. IMAM SAFI'I	Kasi Kesra	LK	Tuban, 14-05-1984	SLTA
9	IMAM WAHYUDI	Kasi Periknel	LK	Tuban, 11 - 11 - 1980	SLTA
10	ZAINUDDIN	Kepala Dusun Jenu	LK	Tuban, 11 - 10 - 1963	SLTA
11	MASYHAR	Kepala Dusun Kejenon	LK	Tuban, 09 - 08 - 1958	SLTA

Sumber data primer RPJM Desa Jenu 2014

Tabel 5. Nama Badan Permusyawaratan Desa Jenu

No	Nama	Jabatan
1	WIDJI ALKASBI, S.Pd	Ketua
2	SISWANTO	Wakil Ketua
3	SHOLEH ASYHAR, S.Sos.I	Sekretaris
4	ENNY KUSMIYATI	Bendahara
5	MARKAN	Anggota

Sumber data primer RPJM Desa Jenu 2014

Tabel 6. Nama-nama LPM Desa Jenu

No	Nama	Jabatan
1	MOH. YUSROH, S.Pd	Ketua
2	K. LILIK, S.Pd	Sekretaris
3	MASHUDI	Bendahara
4	Drs. H. GATOT SUBROTO	Anggota
5	ENY KUSMIYATI	Anggota
6	MOH. SHOLIKIN	Anggota
7	SUNTARI	Anggota

Sumber data primer RPJM Desa Jenu 2014

Tabel 7. Pengurus Karang Taruna Desa Jenu

No	Nama	Jabatan
1	MOH. YUSROH, S.Pd	Ketua
2	ROCHIM PRASETYO	Sekretaris
3	IMAM WAHYUDI	Bendahara
4	MASYKUR	Anggota
5	MASHUDI	Anggota
6	HERMANTO	Anggota
7	LATIFA ZUMAELA	Anggota
8	NUR AFIFAH	Anggota
9	ILFATUN NAFI'AH	Anggota
10	SOLIKIN	Anggota

Sumber data primer RPJM Desa Jenu 2014

Tabel 8. Tim Penggerak PKK Desa Jenu

No	Nama	Jabatan
1	Ny. SHOLIKAH	Ketua
2	Ny. ENI KUSMIYATI	Sekretaris
3	Ny. NAFI'AH	Bendahara
4	Ny. SUHERMIN P.	Anggota
5	Ny. SUNANIK S.	Anggota
6	Ny. RULIEN	Anggota
7	Ny. SITI CHANIFAH	Anggota
8	Ny. SIANA ZUMROTIN	Anggota
9	Ny. MEI SAROH	Anggota
10	Ny. SUMIYATI	Anggota

Sumber data primer RPJM Desa Jenu 2014

Secara umum pelayanan pemerintah desa Jenu kepada masyarakat cukup memuaskan. Kelembagaan yang ada berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap kelembagaan dijalankan secara terorganisir.

5.1.3 Potensi Desa dan Permasalahan Desa

1. Potensi

Desa Jenu memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Potensi-potensi tersebut antara lain:

a. Sumber Daya Alam

Lahan pertanian (sawah) seluas 75,6 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal.

- 1) Lahan tegalan dan pekarangan yang subur seluas 63 Ha, belum dikelola secara maksimal.
- 2) Adanya kawasan hutan konservasi mangrove (Mangrove Center Tuban), yang bisa dikelola bersarna masyarakat.
- 3) Tersedianya area/lahan untuk mencari pakan ternak yang cukup untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan.
- 4) Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik.
- 5) Adanya hasil panen padi, jagung dan lainnya yang cukup melimpah dari hasil pengelolaan sawah bersama masyarakat.
- 6) Adanya potensi sumber air tawar dan sungai yang bisa dikembangkan untuk usaha perikanan air tawar dan irigasi.
- 7) Adanya tambak yang dapat dimanfaatkan untuk budi daya ikan dan udang.
- 8) Karena desa Jenu terletak di daerah pantai, maka memungkinkan untuk pengelolaan perairan pantai tersebut, seperti pembudidayaan hutan mangrove, dan penangkapan ikan.
- 9) Desa Jenu dilalui oleh 2 sungai, hal ini sangat menguntungkan untuk pengairan usaha pertanian.

b. Sumber Daya Manusia

- 1) Kehidupan warga masyarakat yang dari ke masa relatif teratur dan terjaga adat-istiadatnya serta selalu menaati norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- 2) Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
- 3) Digunakannya budaya bermusyawarah di desa dalam setiap penyelesaian permasalahan.
- 4) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat tinggi.
- 5) Masih terjaganya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.

- 6) Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
- 7) Masyarakat masih memelihara budaya saling membantu di antara warga masyarakat.
- 8) Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.
- 9) Adanya kader kesehatan yang cukup dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun dan RT.
- 10) Adanya penduduk yang mempunyai ketrampilan dalam pembuatan meubeler kayu.
- 11) Banyaknya penduduk yang sudah berpendidikan tinggi yang langsung membaaur dengan masyarakat, sehingga dapat mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Kelembagaan / Organisasi

- 1) Hubungan yang baik dan kondusif antara Kepala Desa, Perangkat Desa, lembaga desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk meningkatkan pembangunan desa.
- 2) Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa, LPMD dan BPD yang berperan aktif dalam pembangunan sehingga dapat dipercaya dan memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam setiap kegiatan pembangunan.
- 3) Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, Kelompok Tani dan Kelompok-kelompok keagamaan yang sangat efektif dalam penggalian gagasan arah kebijakan pembangunan.

2. Permasalahan

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musrenbang penyusunan RPJM Desa Jenu yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya. Menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim. Data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi. Rincian

permasalahan yang terjadi di desa Jenu dapat diklasifikasikan menjadi 5 bidang permasalahan, diantaranya:

a. Pendidikan

Masih banyaknya penduduk di desa Jenu yang buta huruf. Sehingga informasi-informasi masih dilakukan secara lisan. Di desa Jenu terdapat lembaga pendidikan baru yang masih dalam tahap pembangunan sehingga masih banyak membutuhkan bantuan dana.

b. Kesehatan dan lingkungan

Masih terdapat beberapa lingkungan yang sanitasinya kurang baik sehingga terkesan kumuh. Di beberapa tempat masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan MCK di sungai. Hal tersebut menjadikan tingkat kesehatan masyarakat masih rendah.

c. Sarana dan prasarana

Masih ada beberapa ruas jalan yang belum diaspal. Ada beberapa jalan aspal yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak parah. Selain itu juga masih memerlukan beberapa pembangunan jembatan.

d. Politik, sosial dan budaya

Masih kurangnya kesadaran politik di desa Jenu. Hal ini terlihat dari beberapa pemilihan umum yang partisipasi masyarakatnya kurang. Bahkan dalam Pilkada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013, angka partisipasi masyarakat hanya mencapai 50%.

e. Ekonomi dan usaha masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berwirausaha. Masyarakat masih menggantungkan diri untuk menjadi karyawan di pabrik-pabrik yang ada di desa Jenu dan sekitarnya. Untuk berwirausaha tentunya masyarakat harus mempunyai bekal keterampilan dan juga modal untuk melakukan suatu usaha.

Dari 5 bidang permasalahan tersebut warga desa merumuskan harapan-harapan untuk 5 tahun ke depan yang diperjelas dengan program rill yang betul-betul mengacu pada titik permasalahan yang ada di lapangan.

5.1.4 Kondisi Infrastruktur Desa Jenu

1. Jalan Desa

Jalan merupakan faktor yang sangat penting dan berpengaruh di dalam suatu wilayah, di mana masyarakatnya melakukan aktifitas ekonomi. Hal tersebut dikarenakan jalan merupakan penghubung suatu wilayah ke wilayah lain. Oleh sebab itu jika kondisi jalan suatu wilayah baik, maka akan mendukung kegiatan dan dapat memperlancar kegiatan ekonomi pertanian petaninya. Namun jika suatu wilayah kondisi jalan kurang baik dan banyak yang berlubang maka akan mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat tersebut.

Desa Jenu memiliki beberapa prasarana jalan yang rusak dan perlu diperbaiki. Jalan yang setiap hari digunakan oleh warga masyarakat desa Jenu untuk melakukan aktifitas distribusi pertanian atau aktifitas ekonomi. Berikut ini data orbitasi dan dokumentasi keadaan jalan desa dari desa Jenu:

Orbitasi (jarak dari pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan)

- | | | |
|--|-------|----|
| a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan | : 2 | Km |
| b. Jarak dari pusat Pemerintahan Kota Administrasi | : 8 | Km |
| c. Jarak dari Ibukota Kabupaten/Kotamadya | : 8 | Km |
| d. Jarak dari Ibukota Propinsi | : 111 | Km |
| e. Jarak dari Ibukota Negara | : 802 | Km |

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan pembangunan yang pengaruhnya sangat besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat khususnya petani. Kondisi jalan yang baik akan mempermudah distribusi hasil pertanian dari satu tempat ke tempat lain seperti pasar. Jika kondisi jalan masih tidak layak (tidak beraspal atau masih berupa tanah) maka akan sangat mengganggu saat musim kemarau akan sangat berdebu dan pada saat musim hujan akan tergenang atau licin karena banyak jalan tanah di desa Jenu bertekstur liat. Menurut perangkat desa Sutrisno mengungkapkan:

“Jalan di sini dulu rusak banget, kalau hujan ya banjir susah buat dilewati motor. Tapi alhamdulillah ya sekarang kan sebagian besar jalan sudah diaspal, jadi ya enak mbak” (Sutrisno).

Kondisi jalan setelah dilakukan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan menjadi jauh lebih baik dan terlihat rapi dan apik. Sehingga memperlancar jalur distribusi usaha pertanian. Kondisi jalan yang baik mendukung kegiatan usaha pertanian dan dapat memperlancar kegiatan ekonomi

lainnya. Kondisi jalan yang baik juga memperlancar usaha masyarakat mencapai tempat lain seperti pusat kesehatan dan pendidikan.



Gambar 4. Kondisi Jalan Setelah Dilakukan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Berdasarkan hasil dokumentasi yang dilakukan di desa Jenu dapat dilihat bahwa kondisi jalan telah membaik dengan dilakukannya pembangunan jalan aspal pada jalan yang sebelumnya merupakan jalan tanah. Kondisi jalan tersebut memperlancar proses distribusi dan kegiatan ekonomi bagi masyarakat desa Jenu atau pengguna jalan lainnya. Hal tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di desa Jenu khususnya petani.

2. Jembatan

Jalan dan jembatan juga merupakan salah satu dari beberapa bentuk infrastruktur yang sering dipergunakan khususnya oleh masyarakat di wilayah pedesaan, keberadaannya sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat di pedesaan demi membantu kelancaran aktivitas sosial mereka khususnya kegiatan usaha pertanian, namun akses jembatan di pedesaan terkadang tidak baik jika dibandingkan dengan kondisi jembatan di perkotaan. Akses jembatan di pedesaan terkadang hanya terbuat dari kayu dan bahan-bahan ala kadarnya yang mana tidak menjamin keselamatan bagi para penggunanya. Di desa Jenu terdapat 8 jembatan penghubung yang pada saat ini kondisinya sudah layak. Namun pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan hanya 1 jembatan utama yang dibangun

yang menghubungkan antara desa Jenu dengan desa Jenggolo, lebarnya 2 meter dan panjangnya 15 meter. Pendanaan pembangunan bukan dari pemerintah namun dari dana sharing antara desa Jenu dengan desa Jenggolo, dengan perbandingan desa Jenggolo 20% dan desa Jenu 80%.



Gambar 5. Pembangunan Jembatan antara Desa Jenggolo dan Jenu

Hasil dokumentasi terhadap proses pembangunan jembatan tersebut dilakukan pada saat proses pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan, namun dengan menggunakan dana sharing dari dua desa dan tidak termasuk anggaran dari program. Hanya waktunya bersamaan dengan pelaksanaan program. Pembangunan jembatan tersebut memperlancar proses distribusi dan transportasi dari dua desa.

3. Prasarana air bersih

Prasarana air bersih merupakan prasarana penunjang kebutuhan konsumsi sehari-hari, baik sebagai kebutuhan untuk masak maupun sarana MCK (Mandi Cuci Kakus). Masyarakat desa Jenu masih terbelang cukup tertinggal karena masih banyak masyarakat yang masih menggunakan sungai sebagai sumber air kebutuhan sehari-hari. Warga desa Jenu yang masih menggunakan air sungai adalah warga atau petani yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari jalan dan saling berjauhan dari rumah warga lainnya, sehingga tidak mendapatkan aliran PDAM atau sumur umum. Selain sebagai sumber masak dan MCK, air juga

digunakan sebagai pengairan untuk irigasi sawah desa. Semakin baik sumber air bersih yang digunakan masyarakat, semakin sehat kehidupannya dan semakin sejahtera kehidupannya, begitu pula sebaliknya. Menurut data dari desa Jenu diperoleh data penggunaan sumber air oleh masyarakat desa Jenu adalah sebagai berikut:

- a. Berlangganan air PDAM : 93 keluarga
- b. Menggunakan sumur umum : 39 keluarga
- c. Menggunakan sumur pribadi : 90 keluarga



Gambar 6. Sumur Pribadi Milik Warga Desa Jenu

Gambar okumentasi di atas merupakan salah satu kondisi sumber air bersih yang dimiliki warga desa Jenu. Berdasarkan observasi atau pengamatan langsung, kepemilikan dari sumur biasanya adalah bersama atau tidak milik individu saja tapi milik bersama dari warga sekitar yang ikut memanfaatkannya. Sumber air bersih dari sumur biasa digunakan jika kondisi aliran air PDAM terganggu.

4. Drainase dan Irigasi Pertanian

Prasarana pertanian yang menunjang secara langsung adalah drainase dan irigasi pertanian, lancarnya saluran irigasi ke lahan pertanian warga sangat mempengaruhi hasil pertanian yang diusahakan. Semakin baik kondisi saluran drainase di pedesaan maka semakin baik pula tingkat kebersihan lingkungan pemukiman karena terhindar dari banjir. Begitu pula dengan saluran irigasi,

semakin baik saluran irigasinya maka usaha pertanian juga semakin baik karena terhindar dari banjir dan saluran irigasi yang mampat. Dari data desa Jenu diperoleh data setelah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan bahwa prasarana irigasi atau pengairan pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Waduk / Ceck Dam : 1 buah
- b. Saluran Irigasi : 3.500 m
- c. Gorong-gorong : 4 buah



Gambar 7. Saluran Drainase Desa Jenu



Gambar 8. Saluran Irigasi yang Telah Dibangun

Hasil dokumentasi yang ditunjukkan pada gambar 7 dan gambar 8 adalah hasil setelah pembangunan infrastruktur drainase dan irigasi dilakukan. Setelah

dibuat saluran drainase dan irigasi terlihat bahwa kondisi desa menjadi semakin bersih dan rapi. Saluran irigasi di sawah yang sebelumnya hanya berbentuk seperti selokan tanah sajadengan kedalaman yang dangkal kini dibangun dari beton dengan kedalaman 50cm-100cm sehingga lebih lancar alirannya dan terhindar dari kemungkinan banjir.

5. Pertokoan Desa Jenu

Di desa Jenu tidak terdapat pasar tradisional, karena pasar tradisional besar hanya terdapat di desa Beji sebagai pasar utama Kecamatan Jenu. Namun masyarakat desa Jenu mendistribusikan hasil pertanian dari desa Jenu ke pasar tradisional desa Beji karena pasar tersebut merupakan pasar utama di Kecamatan Jenu. Di desa Jenu terdapat toko milik pribadi sebanyak 48 buah dan warung sebanyak 16 buah.

“Di sini ndak ada pasar mbak, kalau mau jual jagung atau panen yang lain ya jualnya di pasar besar Beji sana. Beli saprodi ya di pasar situ. Kalau sini ya yang ada warung-warung sama toko aja” (Bapak Dasimo)



Gambar 9. Pertokoan di Desa Jenu

Pertokoan di desa Jenu tersebar dan tidak bergerombol seperti pertokoan di pasar tradisional. Pertokoan tersebut pada dasarnya menjual keperluan sehari-hari saja dan tidak menjual hasil pertanian secara mentah atau segar. Karena pertokoan-pertokoan tersebut menyesuaikan kondisi kebutuhan penduduk setempat yang lebih condong membeli kebutuhan umum seperti gula, minyak goreng, sabun mandi, dan peralatan rumah tangga lainnya.

6. Prasarana Kesehatan/Sanitasi

Sanitasi merupakan prasarana penting penunjang kebutuhan kesehatan sehari-hari, kondisi kamar mandi dan sanitasi yang baik merupakan bukti kondisi kesehatan keluarga yang baik. Jika kondisi sanitasi di keluarga tidak baik maka keluarga tidak akan sejahtera dilihat dari kesehatannya. Di desa Jenu meskipun sebagian besararganya memiliki kamar mandi dan sanitasi milik sendiri, namun masih ada warga yang memanfaatkan sungai sebagai prasarana MCK. Hal tersebut menunjukkan tingkat perhatian warga terhadap kesehatan dan kebersihan masih rendah. Menurut data dari *Coastal Resilience Village 2014* diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Memiliki WC pribadi : 233 keluarga
- b. Menggunakan WC umum : 40 keluarga

“Sumur saya ya dipakai buat sendiri mbak wong punya keluarga sendiri, tapi ya kadang-kadang tetangga ikut ambil air di sini. Kamar mandi ini juga baru bikin mbak, soalnya kan dulu kakus di sungai aja, tapi lama-lama ya malu akhirnya bikin sendiri saja” (Bapak Dasimo)



Gambar 10. Kondisi Sanitasi Salah Satu Keluarga di Desa Jenu

Kondisi sanitasi setiap warga desa Jenu tentu beragam berdasarkan kemampuan finansial dari setiap warga itu sendiri. Semakin baik kondisi finansialnya maka semakin baik pula kondisi sanitasi yang dimiliki. Maka semakin baik pula tingkat kesehatan keluarga tersebut, begitu pula sebaliknya.

7. Pendidikan anak usia sekolah

Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Pendidikan yang mudah dan murah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat. Oleh sebab itu kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumberdaya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sementara itu, sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

Di desa Jenu pendidikan merupakan hal yang wajib diberikan kepada anak-anaknya yang merupakan prioritas utama yang diberikan kepada generasi selanjutnya. Menurut data dari desa Jenu terhitung ada 10 orang anak yang tidak mendapatkan pendidikan diusia sekolah (anak usia 7-18 tahun), hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi yang kurang.

5.2 Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Program PPIP di Desa Jenu

5.2.1 Proses Perencanaan PPIP di Desa Jenu

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan yang dilakukan di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dilaksanakan dengan tahap-tahapan kegiatan yang panjang. Tahapan proses perencanaan PPIP sebelumnya dilakukan tahap persiapan dan sosialisasi kepada penduduk Desa Jenu mengenai Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. Seluruh kegiatan perencanaan dilaksanakan berdasarkan musyawarah desa. Proses awal yang dilakukan adalah rebug persiapan, sosialisasi desa, musyawarah desa I, musyawarah desa II, penyusunan UPD (Usulan Prioritas Desa) desa dan RKM, penyusunan rencana teknis dan

RAB, musyawarah desa III, penandatanganan kontrak kerja (SP3), pencairan dana, pengadaan barang/jasa.

1. Rembug Persiapan



Gambar 11. Rembug Persiapan Warga di Desa Jenu

Rembug persiapan warga ke 1 berkaitan dengan Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan tahun 2013 di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Kegiatan rembug dilakukan pada hari Senin, 7 Oktober 2013 pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Materi atau topik yang dibahas dalam Rembug Penyiapan Warga adalah:

- a. Penjelasan awal mengenai prinsip, pendekatan, mekanisme program
- b. Penjelasan tentang arti pentingnya partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan
- c. Penjelasan tentang peran OMS (Organisasi Masyarakat Setempat), KPP, Kader Desa dan Relawan lainnya
- d. Penjelasan rinci tentang pakta integritas

Pemimpin rapat adalah Tutik dari Kepala Desa Jenu, notulis/sekretaris adalah Sutrisno dari Kaur Umum dan Pemerintahan. Narasumber yang memberikan materi adalah Bambang Ciptahadi dari Kasi PMD Kecamatan Jenu, Syukril Amin dari FM, dan S. Sholihah dari FM. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Materi, peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi kesimpulan dari Rembug Warga, yaitu:

- 1) Seluruh peserta musyawarah menyetujui dengan diberikannya bantuan untuk Desa Jenu dari PPIP dengan segala aturan dan ketentuan di dalamnya.

2) Seluruh peserta musyawarah setuju jika diharuskan mengumpulkan dana swadaya.

2. Sosialisasi Desa

Kegiatan sosialisasi desa bertujuan sebagai kegiatan yang memberikan penjelasan mengenai kegiatan PPIP yang akan dilaksanakan kepada penduduk Desa Jenu. Kegiatan sosialisasi di Desa Jenu sebagai lanjutan tahap kegiatan sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2013, pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB di Balai Desa Jenu. Dihadiri oleh 35 orang peserta yang berasal dari penduduk Desa Jenu. Dihadiri oleh 35 orang peserta sosialisasi perwakilan dari penduduk Desa Jenu. Materi atau topik yang dibahas dalam sosialisasi tersebut adalah:

- a. Penjelasan tujuan, sasaran, pendekatan, dan prinsip-prinsip PPIP
- b. Penjelasan mekanisme pelaksanaan program
- c. Penjelasan komponen dan kriteria infrastruktur
- d. Penjelasan sumber dana dan mekanisme penyaluran dana
- e. Penjelasan mengenai peran pelaku tingkat desa (OMS, KPP, Kader Desa, Pemerintahan Desa)
- f. Penjelasan mengenai Pakta Integritas

Pemimpin rapat adalah Tutik dari Kepala Desa Jenu, notulis/sekretaris adalah Sutrisno dari Kaur Umum dan Pemerintahan. Narasumber yang memberikan materi adalah S. Sholihah dari FM, Syukril Amin dari FM, dan Bambang Ciptahadi dari Kasi PMD Kecamatan Jenu. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi kesimpulan, yaitu:

- 1) Seluruh peserta musyawarah menyetujui mekanisme penyaluran dana PPIP
- 2) Seluruh peserta musyawarah menyepakati segala ketentuan yang terdapat dalam pakta integritas

3. Musyawarah Desa I

Kegiatan Musyawarah Desa I di Desa Jenu sebagai lanjutan tahap kegiatan sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2013, pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Balai Desa Jenu. Dihadiri oleh 54 orang

peserta yang berasal dari penduduk Desa Jenu. Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah desa tersebut adalah:

- a. Memilih dan menetapkan OMS dan keanggotaannya sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di tingkat desa
- b. Memilih dan menetapkan KPP dan keanggotaannya sebagai penanggung jawab pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terbangun
- c. Memilih dan menetapkan KD sebagai aktor pemberdayaan
- d. Menetapkan lokasi sekretariat OMS, KPP dan lokasi pemasangan papan informasi untuk kegiatan PPIP
- e. Menyetakati dan menetapkan jadwal pelaksanaan Musyawarah Desa II
- f. Menyetakati dan Penandatanganan Pakta Integritas

Pemimpin rapat adalah Tutik dari Kepala Desa Jenu, notulis/sekretaris adalah Mokh. Kholik dari Sekretaris Desa Jenu. Narasumber yang memberikan materi adalah S. Sholihah dari FM, Syukril Amin dari FM, dan Bambang Ciptahadi dari Kasi PMD Kecamatan Jenu. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyetakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi kesimpulan, yaitu:

- 1) Memutuskan : Ketua OMS : Hasan
Sek. OMS : Nuryanto
Bend. OMS : Enny Kusmiyati
Anggota OMS: Hj. Mutafaridah, Warsono
- 2) Memutuskan : Ketua KPP : A. Mujib
Sek. KPP : M. Yusroh
Bend. KPP : Sholikhah
Anggota : Supriyatin, Nurhadi
- 3) Memutuskan : Kader Desa : Masyhar, Markan
Keputusan diambil secara *voting*/pemungutan suara.

4. Musyawarah Desa II

Kegiatan Musyawarah Desa II di Desa Jenu sebagai lanjutan tahap kegiatan sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2013, pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB di Balai Desa Jenu. Dihadiri oleh 41 orang

peserta sosialisasi perwakilan dari penduduk Desa Jenu. Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah tersebut adalah:

- a. Perumusan prioritas permasalahan yang terdapat di desa
- b. Perumusan prioritas kegiatan sebagai bahan masukan untuk penyusunan PJM Pronangkis
- c. Ketersediaan lahan/hibah lahan
- d. Pemilihan jenis infrastruktur yang akan dibangun
- e. Perumusan rencana kegiatan untuk penyusunan RKM

Pemimpin rapat adalah Hasan dari Ketua OMS, notulis/sekretaris adalah Enny Kusmiyati jabatan Sekretaris OMS. Narasumber yang memberikan materi adalah S. Sholihah dari FM, Syukril Amin dari FM, dan Bambang Ciptahadi dari Kasi PMD Kecamatan Jenu. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi kesimpulan, yaitu:

- 1) Seluruh peserta musyawarah setuju PPIP 2013 Desa Jenu akan digunakan untuk membangun saluran drainase di sepanjang jalan lingkungan RT 01/RW 02 dan RT 01/ RW 03.
- 2) Seluruh peserta musyawarah setuju mengumpulkan dana swadaya sebesar Rp 4.000.000,00.
5. Penyusunan UPD Desa dan RKP

Usulan Prioritas Desa merupakan suatu wacana (rencana), di mana diharapkan mampu menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa, sebagai penjabaran visi, misi, dan program desa yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJPDDes), serta Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP). Tujuan disusunnya UPD antara lain untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban alam mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintah desa. Tujuan lainnya adalah memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun mendatang.

- a. Bidang Infrastruktur Jalan :

Panjang Jalan Kabupaten yang ada di Desa	= 0,150	Km
Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Rusak yang ada di Desa	= -	Km
Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik yang ada di Desa	= 0,150	Km
Panjang Jalan Poros Desa yang ada di Desa	= 4,5	Km
Panjang Jalan Poros Desa Kondisi Rusak yang ada di Desa	= -	Km
Panjang Jalan Poros Desa Kondisi Baik yang ada di Desa	= 4,5	Km
Panjang Jalan Lingkungan yang ada di Desa	= 4,9	Km
Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Rusak yang ada di Desa	= 2,8	Km
Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik yang ada di Desa	= 2,1	Km
Panjang Jalan Madakam dalam Kondisi Rusak di Desa	= 1	Km
Panjang Jalan Tanah	= 2,7	Km

b. Air Bersih :

Rincian permasalahan terkait dengan penyediaan air bersih di desa :

Jumlah Daerah/Dusun yang rawan air bersih = 2 Dusun

Kedua dusun tersebut hanya 30 % yang mendapat aliran air bersih dari PDAM Kabupaten Tuban, sedangkan lainnya menggunakan air tanah dan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari 30 % yang mendapatkan air PDAM Kabupaten Tuban itupun sering telat dan belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Bidang Pendidikan :

Jumlah SDN yang ada di Desa = 1 buah

Jumlah SDN Kondisi Rusak di Desa = - gedung

Jumlah MI yang ada di Desa = 1 buah

(Belum mempunyai gedung sendiri)

Jumlah MI Kondisi Rusak di Desa = - gedung

Jumlah SMPN yang ada di Desa = - buah

Jumlah SMPN Kondisi Rusak di Desa = - gedung

Jumlah MTs yang ada di Desa = 1 buah

Jumlah MTs dalam Kondisi Rusak = 1 gedung

Jumlah SMU/Aliyah yang ada di Desa = 1 buah

(Belum mempunyai gedung sendiri)

Jumlah SMU/Aliyah Kondisi Rusak di Desa = -gedung

d. Bidang Kesehatan :

Jumlah Polindes yang ada di Desa	= 1 buah
Jumlah Polindes Kondisi Rusak di Desa	= 1 gedung
Angka Kunjungan Rata-rata ke Polindes	= 30 orang / bulan
Jumlah Poskesdes yang ada di Desa	= 1 buah
Jumlah Poskesdes Kondisi Rusak di Desa	= 1 buah
Jumlah Posyandu yang ada di Desa	= 3 Pos

(Belum mempunyai gedung sendiri)

e. Bidang / Fungsi Pertanian :

Luas lahan sawah tadah hujan	= - Ha
Luas lahan sawah irigasi	= 75,6 Ha
Panjang saluran irigasi	= 3,5 Ha
Panjang saluran irigasi yang sudah diplengseng	= 462 m
Jumlah DAM	= 1 buah

6. Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM)

Kegiatan penyusunan rencana kegiatan masyarakat di Desa Jenu sebagai lanjutan tahap kegiatan sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 3 November 2013, pukul 09.00 sampai selesai di Balai Desa Jenu. Kegiatan tersebut telah dilakukan penyusunan dan pengiriman RKM, yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, OMS, KPP, dan KD dengan usulan Rencana Kegiatan Masyarakat. Rincian RKM adalah sebagai berikut :

- Jenis kegiatan : Pembangunan Saluran Drainase
- Volume (panjang) : 1.200 m
- Lokasi kegiatan : RT 001 RW 002 dan RT 001 RW 003
- Jumlah Dana :

PPIP	: Rp 250.000.000,-
Swadaya	: Rp 4.000.000,-

Jadwal kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur akan digambarkan melalui tabel 11, seperti berikut:

Tabel 9. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

No	KEGIATAN	November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan								
2	Pendaftaran Tenaga Kerja								
3	Pembesihan Lokasi								
4	Pengadaan material/bahan								
5	Trial dan Pelaksanaan Kegiatan								
6	Pengendalian dan Pengawasan								
7	Evaluasi dan Pelaporan								

Sumber data primer Laporan Akhir PPIP Desa Jenu 2013

7. Penyusunan Rencana Teknik dan RAB (Rencana Anggaran Biaya)

Tahapan ini berisi tentang pemeriksaan desain dan rencana anggaran biaya, meliputi:

- a. Lokasi pelaksanaan jelas di peta desa
- b. Lokasi tepat
- c. Pemilihan jenis konstruksi yang sesuai
- d. Ukuran konstruksi sesuai
- e. Denah dan Tampang lengkap
- f. Gambar detail desain lengkap
- g. Dimensi dan spesifikasi lengkap
- h. Perhitungan teknis konstruksi pokok sesuai
- i. Perhitungan volume sesuai
- j. Alasan pemakaian dan perhitungan alat berat sesuai
- k. Harga satuan wajar

Total anggaran biaya yang dibutuhkan = Rp 245.000.000,00

8. Musyawarah Desa III

Kegiatan Musyawarah Desa III di Desa Jenu sebagai lanjutan tahap kegiatan sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013, pukul 13.30 sampai selesai di Balai Desa Jenu. Dihadiri oleh 43 orang peserta perwakilan dari

penduduk Desa Jenu. Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah desa tersebut adalah:

- a. Penetapan rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur
- b. Penetapan Rencana Operasi dan pemeliharaan
- c. Penetapan Rencana Biaya Pemeliharaan
- d. Pemilihan dan penetapan panitia pengadaan barang/jasa

Pemimpin rapat adalah Hasan dari Ketua OMS, notulis/sekretaris adalah Enny K. dari Sekretaris OMS. Narasumber yang memberikan materi adalah S. Sholihah dari FM, Syukril Amin dari FM, dan Bambang Ciptahadi dari Kasi PMP Kecamatan Jenu serta Tutik dari Kepala Desa. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi kesimpulan, yaitu:

1) Penetapan Tenaga Kerja (HOK)

Kepala Kelompok : Rp 60.000,00

Tukang : Rp 50.000,00

Pekerja : Rp 40.000,00

2) Menyepakati dan menetapkan dana Operasional Pemeliharaan dan Rencana Pengumpulan Dana OP sebesar Rp 4.000.000,00

9. Penandatanganan Kontrak Kerja

10. Pencairan Dana

Tahapan pencairan dana terdiri dari 3 tahap. Tahap 1 (40 %) pencairan dana sebesar Rp 100.000.000,-. Kemudian tahap II (70 %) pencairan dana sebesar Rp 75.000.000,-. Kemudian tahap III (100%) pencairan dana sebesar Rp 75.000.000,-.

5.2.2 Proses Pelaksanaan PPIP di Desa Jenu

1. Pelaksanaan Fisik Infrastruktur

Proses pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Jenu dilakukan berdasarkan dua macam kegiatan yaitu pelaksanaan fisik infrastruktur dan nonfisik. Tahapan pelaksanaan PPIP merupakan kegiatan pelaksanaan yang dilakukan setelah tahapan proses perencanaan yang panjang. Pada tahap ini berisi tentang catatan harian kegiatan pembangunan, daftar hadir

bagi pekerja, catatan harian penggunaan material, laporan kemajuan pelaksanaan mingguan dan bulanan. Pelaksanaan PPIP mulai dari 0%, 36%, 50%, 60%, sampai dengan 100% dilakukan dalam kurun waktu 72 hari. Tercatat sejak tanggal kerja 01 November 2013 sampai dengan 11 Januari 2014. Berikut ini merupakan dokumentasi dari kegiatan pelaksanaan kerjanya, yaitu pada gambar 12 sampai dengan gambar 16.



Gambar 12. Pembangunan Saluran Irigasi selama Proses Pelaksanaan PPIP



Gambar 13. Kondisi Saluran Irigasi Desa Jenu Saat Ini



Gambar 14. Kondisi Jalan yang telah Mendapat Bantuan PPIP di Desa Jenu



Gambar 15. Kondisi Jalan Desa Setelah Drainase Dibuat di Desa Jenu



Gambar 16. Pembangunan Jembatan di Desa Jenu

Pelaksanaan fisik pembangunan dilakukan oleh pekerja bangunan dari luar desa, dan dipantau setiap hari oleh perangkat desa dan pihak terkait. Kegiatan pembangunan dilakukan setiap hari jika dalam kondisi cuaca yang memungkinkan, karena dalam proses pembangunan terkadang pembangunan terhalang oleh hujan sehingga harus penghentian proses pelaksanaannya sementara waktu. Dan kegiatan berakhir pada tanggal 11 Januari 2014.

2. Musyawarah Desa IV dan Serah Terima Pekerjaan



Gambar 17. Serah Terima Pekerjaan Ketika Musyawarah Desa IV

Kegiatan Musyawarah Desa IV di Desa Jenu sebagai tahap kegiatan terakhir dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2014, pukul 15.00 sampai pukul 17.30 di Balai Desa Jenu. Dihadiri oleh 59 orang peserta perwakilan dari penduduk Desa Jenu. Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah desa tersebut adalah:

- Memberikan informasi hasil pelaksanaan kegiatan dan hasil pengelolaan dana bantuan oleh OMS kepada masyarakat desa sasaran.
- Serah terima dana pengelolaan infrastruktur kepa KPP.

Pemimpin rapat adalah Hasan dari Ketua OMS, notulis/sekretaris adalah Enny K. dari Sekretaris OMS. Narasumber yang memberikan materi adalah S. Sholihah dari FM, Syukril Amin dari FM, dan Bambang Ciptahadi dari Kasi PMD Kecamatan Jenu. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang

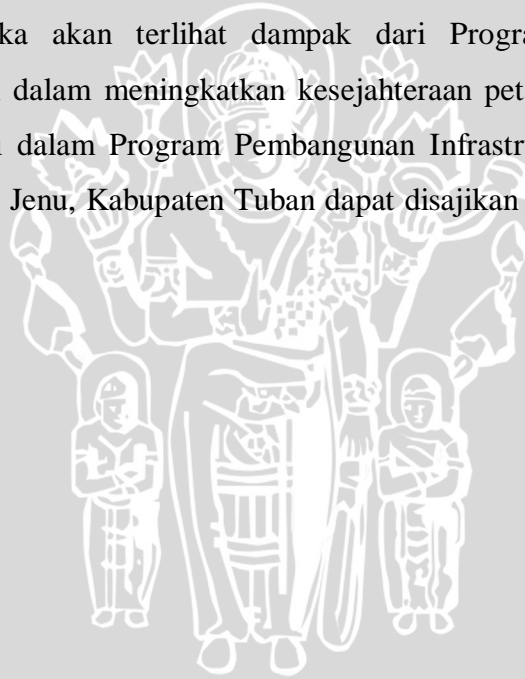
ditetapkan menjadi kesimpulan, yaitu menerima hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana PPIP oleh OMS.

5.3 Dampak Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan terhadap Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani yang mengikuti Program Pemangunan Infrastruktur Pedesaan terdiri dari empat indikator:

1. Pemerataan Pendapatan
2. Pendidikan yang Semakin Mudah Dijangkau
3. Kualitas Kesehatan
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Memadai

Sub variabel berdasarkan atas pengukuran kesejahteraan. Adanya sub variabel tersebut maka akan terlihat dampak dari Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Kesejahteraan Rumah Tangga petani dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dapat disajikan dalam Tabel 10 di bawah ini:



Tabel 10. Dampak Sebelum dan Sesudah Program PPIP

No	Indikator	Sebelum Pelaksanaan Program PPIP			Setelah Pelaksanaan Program PPIP			Peningkatan (%)
		Skor di Lapangan	Skor Maksimal	Presentase (%)	Skor di Lapangan	Skor Maksimal	Presentase (%)	
1	Pendapatan							
	a. Sumber Pendapatan	2,16	3	72	2,19	3	72,97	0,97
	b. Penerimaan	2,32	3	77	2,78	3	92,77	15,77
	c. Penjualan	2,21	3	73,87	2,51	3	83,77	9,9
2	Pendidikan	2,94	3	98	3	3	100	2
3	Kesehatan	2,02	3	67,33	2,46	3	81,97	14,64
4	Air Bersih & Sarana Kes.	2,16	3	72,07	2,84	3	94,57	22,5
	Total	13,84	18	76,71%	15,78	18	87,66%	
	Kategori	Sedang		Sedang	Tinggi		Tinggi	

Sumber: Analisis Data Primer, 2015

Berasarkan Tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa tingkat kesejahteraan yang paling tinggi adalah peningkatan sumber air bersih dan sarana kesehatan (MCK) dengan skor di lapangan sebelum mengikuti Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebesar 2,16 (72,07%) dan sesudah mengikuti Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebesar 2,84 (94,57%) dengan demikian peningkatannya sebesar 22,5%. Sarana sumber air bersih dan sarana saluran sanitasi merupakan salah satu infrastruktur yang paling dibutuhkan di desa Jenu, hal tersebut dikarenakan Desa Jenu memiliki aliran sungai yang banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Peningkatan skor sebelum dan sesudah pelaksanaan program terlihat dengan meningkatnya penggunaan sarana air bersih dari penggunaan sungai menjadi menggunakan aliran PDAM dan sumur pribadi. Kemudian peningkatan sarana kesehatan seperti sanitasi. Sebelum program petani banyak melakukan mandi cuci

kakus di sungai dan kemudian beralih menggunakan kamar mandi sendiri setelah program.

“Dulu sebelum ada program pembangunan dari pemerintah itu ya warga sini masih banyak yang mandi nyuci sama buang air di sungai mbak. Tapi sekarang ya gini, akhirnya banyak yang sadar kebersihan dan bangun kamar mandi sama pasang PDAM sendiri” (Bapak Mas Her, 2015).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara sebanyak 37 orang responden sejak awal sebelum Program Pembangunan Infrastruktur tingkat pendidikan bagi anggota keluarga yang memiliki anak usia sekolah sangat tinggi yaitu 2,94 (98%) yang kemudian meningkat menjadi 3 (100%) setelah program dilakukan. Hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan merupakan perhatian utama masyarakat Desa Jenu terhadap putra-putri mereka.

“Semua anak saya kalau bisa harus sekolah, jaman sekarang tidak bisa dapat kerja enak kalau pendidikan tidak tinggi mbak. Makanya anak-anak semua ya harus sekolah, minimal SMA mbak” (Bapak Damuri).

Menurut perbandingan data jumlah penduduk menurut kelompok pendidikan berdasarkan data Monografi Desa meningkat sebelum pelaksanaan program (2012) dan setelah pelaksanaan program (2014) dijabarkan melalui data pada tabel 11 berikut:

Tabel 11. Peningkatan Pendidikan Sebelum dan Sesudah PPIP

Sebelum PPIP 2012	Setelah PPIP 2014
1. 00 – 03 tahun : 54 orang	1. 00 – 03 tahun : 95 orang
2. 04 – 06 tahun : 36 orang	2. 04 – 06 tahun : 87 orang
3. 07 – 12 tahun : 156 orang	3. 07 – 12 tahun : 162 orang
4. 13 – 15 tahun : 113 orang	4. 13 – 15 tahun : 93 orang
5. 16 – 18 tahun : 84 orang	5. 16 – 18 tahun : 100 orang

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 10, menempati ranking pertama, peningkatan air bersih dan sarana kesehatan (saluran sanitasi) sebelum mengikuti program skor dilapang sebesar 2,16 (72,07%) dan sesudah mengikuti program sebesar 2,84 (94,57%) dengan peningkatan sebesar 22,5%. Menempati ranking kedua, penerimaan usaha tani sebelum mengikuti program skor di lapang sebesar 2,32

(77%) dan sesudah mengikuti program sebesar 2,78 (92,77%) dengan peningkatan sebesar 15,77%. Menempati ranking ketiga adalah tingkat kesehatan yang sebelum program sebesar 2,02 (67,33%) dan setelah program sebesar 2,46 (81,97%) dengan peningkatan 14,64%. Menempati ranking keempat adalah tingkat pendapatan yaitu penjualan usaha tani yang sebelum program sebesar 2,21 (73,87%) dan setelah program sebesar 2,51 (83,77%) dengan peningkatan 9,9%. Rangkaian kelima adalah pendidikan yang skor di lapangan sebelum program sebesar 2,94 (98%) meningkat 2% setelah program menjadi 3 (100%). Dan rangkaian keenam adalah sumber pendapatan sebelum program skor di lapangan sebesar 2,16 (72%) dan meningkat 0,97% setelah program sebesar 2,19 (72,97%).

5.3.1 Pemerataan Pendapatan

Dalam mencapai kata sejahtera banyak faktor yang menentukan. Salah satu faktor tersebut yaitu pemerataan pendapatan setiap warganya. Jika suatu wilayah mempunyai pendapatan rata-rata tinggi atau minimal mampu mencapai upah minimum regional maka daerah tersebut dikatakan sejahtera dibidang pendapatan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan masyarakatnya. Di Desa Jenu yang sebagian masyarakatnya merupakan petani memiliki tingkat pendapatan yang tidak menentu karena kondisi usaha tani yang dipengaruhi musim, hama penyakit dan harga pasar yang terus berubah.

Pendapatan usaha tani diperoleh dari penerimaan keseluruhan usaha tani dikurangi dengan penjualan usaha tani. Pendapatan petani sebelum program selama musim panen memiliki jumlah yang beragam, setelah keseluruhan penerimaan dijumlahkan (dari 37 responden) hasil totalnya Rp 83.150.000,- kemudian jika dirata-rata sebesar Rp 2.247.297,- meningkat setelah program menjadi total keseluruhan Rp 123.550.000,- jika dirata-rata sebesar Rp 3.339.189,-. Sehingga pendapatan petani secara signifikan meningkat setelah program pembangunan infrastruktur pertanian pedesaan.

“Tahun kemarin (2014) bagus mbak panennya, ya irigasinya kan sudah diperbaiki dan aliran airnya jadi lancar. Musimnya juga lagi bagus, tetangga saya ada yang turun panennya karena penyakit tapi alhamdulillah panen saya bagus dibanding tahun sebelumnya” (Bapak Samsuri).

Berdasarkan wawancara mendalam dengan responden, adanya peningkatan pendapatan petani dipengaruhi oleh musim dan harga pasar, serta distribusi dan usaha semakin lancar karena kondisi jalan yang semakin baik dan saluran irigasi yang semakin baik. Seperti yang diungkapkan Bapak Samsuri:

5.3.2 Pendidikan yang Semakin Mudah Dijangkau

Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Pendidikan yang mudah dan murah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Melalui pendidikan yang tinggi, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat. Oleh sebab itu kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sementara itu, sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Seperti salah satu petani yang menjelaskan bahwa:

“Anak saya 2 dan yang terakhir belum bisa masuk sekolah karena kondisi biaya kurang. Tapi sekarang sudah masuk sekolah, alhamdulillah ada rejeki dan dapat bantuan dana pendidikan dari pemerintah mbak” (Bapak Tarmi).

Kondisi pendidikan keluarga yang sejahtera apabila kebutuhan akan pendidikan terpenuhi. Adapun skor pendidikan sebelum adanya program skor di lapang sebesar 2,94 (98%) dengan kategori tinggi (ada anak usia sekolah tidak bersekolah) dan sesudah adanya program sebesar 3 (100%) dengan peningkatan sebesar 2% dan berkategori tinggi (semua anak usia sekolah bersekolah).

5.3.3 Kualitas Kesehatan

Kesehatan dalam artian keluarga sejahtera apabila anak sakit dibawa ke petugas kesehatan atau pengobatan modern. Keadaan kesehatan diukur dengan menggunakan indikator sarana kesehatan anggota keluarga. Sebelum mengikuti program di lapang skor kesehatan sebesar 2,02 (67,33%) dan sesudah program

sebesar 2,46 (81,97%) dengan peningkatan sebesar 14,64%, dan sebelum mengikuti Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan masyarakat di Desa Jenu jika ada anggota keluarga yang sakit maka diobati dengan obat yang dijual bebas seperti salah satu responden (Ibu Sholikhah, 2015) mengatakan:

“Biasanya kalau ada yang sakit ya dibelikan obat-obat di toko aja mbak, sakitnya ya paling Cuma pusing, batuk, panas. Malas kalau ke puskesmas, jauh mbak” (Ibu Sholikhah, 2015).

Tetapi setelah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan tersebut sudah mampu meningkatkan kesehatan dengan cara memeriksakan kesehatannya ke puskesmas atau dokter apabila sakit, seperti salah satu responden (Bapak Durahman, 2015) mengatakan:

“Sekarang kalau ada anggota yang sakit kita bawa ke puskesmas, soalnya ada puskesmas yang dekat, ada juga pak dokter yang buka praktik di dekat sini mbak jadi lebih enak langsung priksa di sana” (Bapak Durahman, 2015).

Peningkatan kesejahteraan dilihat dari membaiknya perhatian petani terhadap kesehatan keluarga dapat diketahui dari berubahnya pola pikir petani dalam mengambil kesimpulan. Semakin baik kesejahteraan suatu keluarga maka keluarga tersebut akan memilih pilihan terbaik jika terdapat anggota keluarga yang sakit. Maka membuktikan bahwa perhatian petani terhadap kesehatan semakin baik.

5.3.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Memadai

Adanya infrastruktur yang memadai sangat membantu untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang sangat berpengaruh contohnya jalan, jembatan, pasar, dan lain-lain. Oleh sebab itu keberadaan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh masyarakat apalagi yang berada jauh dari pusat kota karena menjadi sarana penunjang bagi pertumbuhan ekonomi. Sarana dan prasarana yang memadai di sini yang dimaksud adalah pembangunan sumber air bersih, drainase dan saluran sanitasi masyarakat Desa Jenu. Sebelum adanya program skor di lapangan sebesar 2,16 (72,07%) dan setelah program skor di lapangan sebesar 2,84 (94,57%) dengan peningkatan sebesar 22,5%. Seperti yang dikatakan oleh salah satu warga (Bapak Darsuki), mengatakan:

“Sebelumnya saya pakai kamar mandi umum di dekat sungai sana, belum bisa bikin kamar mandi sendiri mbak. Tapi ya setelah irigasi diperbaiki kayaknya panen jadi baik dan alhamdulillah sekarang bisa bangun kamar mandi sendiri. Saya juga dapat aliran air PDAM dari pemerintah. Jadi sekarang sudah nggak pakai air sungai lagi.” (Bapak Darsuki)

Sumber air bersih diperoleh dari pemasangan PDAM dan sumur pribadi milik warga. Jika masyarakat menggunakan sumber air yang bersih maka kesehatannya terjaga dengan baik. Pembangunan saluran drainase dan irigasi persawahan dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga ketika hujan air tidak menggenang di jalan dan mengganggu pengguna jalan, saluran irigasi yang diperbaiki bertujuan untuk memperlancar aliran air untuk lahan sawah warga sehingga hasil panen usaha tani meningkat. Sedangkan saluran sanitasi warga sekarang meningkat, warga kini setelah program banyak yang membangun saluran sanitasi sendiri sehingga mandi cuci kakus (MCK) memadai dan mempengaruhi kesehatan masyarakat di Desa Jenu.

5.4 Tingkat Kesejahteraan Petani Setelah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan yang telah dilaksanakan di Desa Jenu pada tahun 2013 memperoleh pencapaian hasil yang positif. Tingkat kesejahteraan Petani dilihat dari indikator-indikator yang digunakan mendapatkan hasil yang meningkat dengan baik. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dengan 37 orang responden petani yang hasilnya dapat dilihat dari tabel 12:

Tabel 12. Peningkatan Kesejahteraan Petani terhadap Program PPIP

No	Indikator	Sebelum Pelaksanaan Program PPIP			Setelah Pelaksanaan Program PPIP			Peningkatan (%)
		Skor di Lapang	Skor Max	Presentase (%)	Skor di Lapang	Skor Max	Presentase (%)	
1	Pendapatan							
	a. Sumber Pendapatan	2,16	3	72	2,19	3	72,97	0,97
	b. Penerimaan	2,32	3	77	2,78	3	92,77	15,77
	c. Penjualan	2,21	3	73,87	2,51	3	83,77	9,9
2	Pendidikan	2,94	3	98	3	3	100	2
3	Kesehatan	2,02	3	67,33	2,46	3	81,97	14,64
4	Air Bersih & Sarana Kes.	2,16	3	72,07	2,84	3	94,57	22,5
	Total	13,84	18	76,71%	15,78	18	87,66%	
	Kategori	Sedang		Sedang	Tinggi		Tinggi	

Sumber: Analisis Data Primer, 2015

Berdasarkan tabel 12 analisis dampak pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebelumnya dapat dipastikan tingkat kesejahteraan petani di Desa Jenu meningkat dengan baik dengan adanya Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. Hasil analisis perhitungan pendapatan rata-rata dari 37 orang responden sebelum program adalah sebesar Rp 2.247.297,- dan meningkat setelah program menjadi sebesar Rp 3.339.189,-. Berdasarkan hasil perhitungan total skor di lapang sebelum program adalah 13,84 (76,71%) dengan kategori sedang, meningkat setelah program menjadi 15,78 (87,66%) dengan kategori tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Tingkat kesejahteraan petani yang meningkat dapat dipengaruhi secara langsung oleh pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui program, namun dapat juga karena kesadaran petani itu sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya di dalam masyarakat. Dilihat dari penampang real di lapang, kini telah banyak petani yang memiliki sumber air bersih pribadi (air PDAM, sumur, dan kamar mandi). Meskipun jika diketahui masih ada yang mandi di sungai itu dikarenakan kebiasaan pribadi atau kebutuhan mendesak karena tidak mendapatkan aliran PDAM atau memang masih tidak mampu membuat sumur

sendiri. Namun kondisi tersebut semakin membaik setelah dilaksanakan program PPIP. Selain dilihat dari indikator air bersih dan sarana kesehatan (sanitasi), tingkat kesejahteraan petani yang membaik juga dapat diketahui dari meningkatnya penerimaan petani pada saat setelah program, pendidikan yang semakin mudah dijangkau karena membaiknya kondisi bangunan sekolah dan bantuan-bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah, serta tingkat kesehatan petani yang meningkat dilihat dari cara petani mengobati dirinya yang dulu sebelum program lebih memanfaatkan obat tradisional dan obat bebas yang dijual ditoko atau warung kemudian meningkat menjadi sering berobat ke puskesmas atau dokter yang membuka praktik.

5.5 Persepsi Petani terhadap Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Pemerintah telah melakukan upaya pembangunan pedesaan, baik pemerintah daerah dan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan. Usaha-usaha tersebut telah menghasilkan berbagai kemajuan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat pedesaan. Tetapi, masih banyak wilayah pedesaan yang belum berkembang seperti wilayah lainnya. Pembangunan wilayah pedesaan sangat penting dilakukan karena masih sekitar 50% penduduk Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan. Sebuah pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar apabila pemerintah saja yang menjadi pelaku yang melaksanakan, namun masyarakat juga perlu disertakan dalam proses pembangunan karena masyarakat tidak cukup dijadikan obyek pembangunan karena masyarakat itu sendiri yang mengetahui kebutuhan dan keadaan daerahnya.

Oleh karena itu peran masyarakat sangat penting baik sebagai obyek maupun subyek pembangunan. Masyarakat dapat turun langsung dalam usaha pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan ikut langsung berpartisipasi melalui musyawarah yang dilakukan dalam mensukseskan pembangunan. Kegunaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu mampu merangsang timbulnya perhatian masyarakat yang menjadi dukungan dalam pembangunan, mampu meningkatkan motivasi dan keterampilan masyarakat dalam membangun, pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta pembangunan lebih luas meskipun dana terbatas, dan

tidak menciptakan ketergantungan terhadap masyarakat. Menurut Bapak Dasimo sebagai Ketua RT 01/RW 03 mengatakan:

“Pembangunannya saya tidak tahu dilakukan tanggal berapa, soalnya sosialisasinya kemarin saya ndak ikut, mbak. Menurut saya ya sosialisasinya kurang menyeluruh ke warga yang lain. Tapi saya sendiri puas sama pembangunannya, soalnya pemerintah turun langsung buat mengawasi. Soalnya saluran irigasi yang ada di dekat jembatan sana dulu pembangunannya dari dana desa sendiri jadi agak berantakan gitu bentuknya. Beda sama yang diawasi pemerintah langsung, kelihatannya rapi, mbak” (Bapak Dasimo, 2015).

Untuk melakukan pembangunan pedesaan, akan terus dilakukan berbagai program dan kegiatan terkait dengan peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan pedesaan. Sasaran dan target pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan untuk tingkat individu adalah agar dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan meningkatkan motivasi dalam melakukan usaha tani dikarenakan jalan dan jembatan yang telah diperbaiki memperlancar saluran distribusi serta perbaikan saluran irigasi sebagai upaya memperlancar usaha tani. Target yang ingin dicapai adalah masing-masing masyarakat dapat mensejahterakan dirinya dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Program ini membangun sarana dan prasarana pendukung pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi petani atas kemanfaatan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebagai rumah tangga miskin. Dari hasil penelitian, manfaat yang dirasakan oleh petani atas pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dipandang dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatanyaitu adanya peningkatan yang baik. Dari empat indikator kesejahteraan yaitu pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, tingkat kesehatan dan sarana sumber air bersih dan sarana prasarana kesejahatan yang memadai dapat meningkat dari sebelum program dilakukan. Perubahan dari kategori sedang menjadi kategori tinggi.

Namun nyatanya meskipun pelaksanaan program dilakukan di Desa Jenu, masih banyak petani yang tidak mengetahui tentang pembangunan infrastruktur

tersebut (jalan, jembatan, saluran drainase), karena yang menjadi perhatian utama bagi petani adalah adanya perbaikan saluran irigasi yang memang berpengaruh langsung terhadap peningkatan usaha tani. Secara umum program ini sebenarnya bermanfaat untuk masyarakat setempat, bukan khusus untuk petani saja. Pelaksanaan program ini adalah membangun infrastruktur pedesaan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada gambaran umum pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan tersebut adalah merupakan pembangunan yang hasilnya dapat digunakan untuk masyarakat umum.

Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tertinggal. Namun apakah pada kenyataannya program ini dapat mensejahterakan masyarakat, peneliti mencoba mendekati dengan mengadakan survey terhadap petani. Peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi dari petani terhadap pelaksanaan program PPIP. Apakah benar-benar tercapai sasaran atau target dari program ini untuk tingkat petani dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Hasil dari penelitian ini adalah petani sebagai responden pada Desa Jenu bekerja hanya dari pertanian saja. Sehingga mereka hanya bergantung kepada hasil pertanian saja. Beberapa dari 37 responden pada Desa Jenu merupakan tenaga kerja yang tidak produktif, maksudnya mereka yang mampu bekerja secara produktif, namun karena suberdaya-sumberdaya penolong kurang memadai maka mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan baik kecuali dari pertanian.

Persepsi responden pada Desa Jenu ini adalah mereka merasa cukup puas dengan dilaksanakannya Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan karena memperlancar usaha ekonomi mereka seperti jalan dan jembatan yang memperlancar distribusi usaha tani, pembuatan drainase guna mencegah banjir, perbaikan sarana kesehatan seperti MCK atau sanitasi keluarga, perbaikan sumber air bersih untuk kesehatan masyarakat, serta pembuatan saluran irigasi untuk memperlancar pengairan langsung ke lahan pertanian. Responden mengaku sebelumnya menggunakan air sungai sebagai kebutuhan air sehari-hari dan untuk MCK. Disini terlihat bahwa kurangnya perhatian masyarakat khususnya petani terhadap kebersihan dan kesehatan diri, namun setelah program masyarakat atau

petani sadar dengan tingkat kesehatan mereka dan membangun saluran sanitasi pribadi.

Responden mengatakan dengan adanya program PPIP penerimaan usahata tani dan penjualan usahatani meningkat dari sebelum dan setelah dilaksanakan program, sebelum program pendapatan rata-rata petani adalah Rp2.247.297,- dan meningkat menjadi rata-rata Rp 3.339.189,- setelah dilaksanakan program. Responden cukup puas dengan dilaksanakannya Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan karena secara bertahap petani mampu mensejahterakan kehidupannya karena adanya peningkatan pendapatan usaha tani dengan dibangun dan diperbaikinya sarana dan prasarana penunjang usahatani pertanian. Responden juga merasa puas karena kini kondisi jalan desa menjadi lebih baik dengan beraspal dan jalan memiliki saluran drainase yang baik.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Dampak Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan dan pelaksanaan Program PPIP Desa Jenu dilakukan melalui tahapan proses:

1) Proses perencanaan PPIP di Desa Jenu yang berisi tahapan proses, yaitu : Rembug Persiapan, Sosialisasi Desa, Musyawarah Desa 1, Musyawarah Desa 2, Penyusunan UPD (Usulan Prioritas Desa) Desa dan RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan), Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), Penyusunan Rencana Teknik dan RAB (Rencana Anggaran Biaya), Musyawarah Desa 3, Penandatanganan Kontrak, Pencairan Dana, Proses Pelaksanaan Fisik Infrastruktur, dan Musyawarah Desa 4.

2. Dampak Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan terhadap Kesejahteraan Petani

Berasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat kesejahteraan petani di Desa Jenu sebelum adanya PPIP berada dalam kategori sedang dengan persentase 76,71% di mana skor rata-ratanya 13,84 dan skor maksimalnya 18. Setelah pelaksanaan PPIP berada dalam kategori tinggi dengan persentase 87,66% dimana skor rata-ratanya 15,78 dan skor maksimalnya 18. Ini artinya bahwa kondisi kesejahteraan petani di Desa Jenu sesudah adanya pelaksanaan PPIP tersebut sudah sesuai dengan panduan, sasaran dan target yang sebenarnya.

3. Tingkat Kesejahteraan Petani Setelah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat kesejahteraan petani di Desa Jenu dapat dipastikan tingkat kesejahteraan petani di Desa Jenu meningkat dengan baik dengan adanya Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan. Hasil analisis perhitungan pendapatan rata-rata dari 37 orang responden sebelum program adalah sebesar Rp 2.247.297,- dan meningkat setelah program menjadi sebesar

Rp 3.339.189,-. Berdasarkan hasil perhitungan total skor di lapang sebelum program adalah 13,84 (76,71%) dengan kategori sedang, meningkat setelah program menjadi 15,78 (87,66%) dengan kategori tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

4. Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Hasil dari penelitian ini adalah petani sebagai responden pada Desa Jenu bekerja hanya dari pertanian saja, sehingga mereka hanya bergantung kepada hasil pertanian saja. Persepsi 37 orang responden pada Desa Jenu ini adalah mereka merasa cukup puas dengan dilaksanakannya Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan karena memperlancar usaha ekonomi mereka seperti jalan dan jembatan yang memperlancar distribusi usaha tani, pembuatan drainase guna mencegah banjir, perbaikan sarana kesehatan seperti MCK atau sanitasi keluarga, perbaikan sumber air bersih untuk kesehatan masyarakat, serta pembuatan saluran irigasi untuk memperlancar pengairan langsung ke lahan pertanian. Responden mengaku sebelumnya menggunakan air sungai sebagai kebutuhan air sehari-hari dan untuk MCK. Disini terlihat bahwa kurangnya perhatian masyarakat khususnya petani terhadap kebersihan dan kesehatan diri, namun setelah program masyarakat atau petani sadar dengan tingkat kesehatan mereka dan membangun saluran sanitasi pribadi.

Responden mengatakan dengan adanya program PPIP penerimaan usahata tani dan penjualan usahatani meningkat dari sebelum dan setelah dilaksanakan program, sebelum program pendapatan rata-rata petani adalah Rp2.247.297,- dan meningkat menjadi rata-rata Rp 3.339.189,- setelah dilaksanakan program. Responden cukup puas dengan dilaksanakannya Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan karena secara bertahap petani mampu mensejahterakan kehidupannya karena adanya peningkatan pendapatan usaha tani dengan dibangun dan diperbaikinya sarana dan prasarana penunjang ushatani pertanian. Responden juga merasa puas karena kini kondisi jalan desa menjadi lebih baik dengan beraspal dan jalan memiliki saluran drainase yang baik.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dibutuhkan kerjasama antara fasilitator desa, masyarakat Desa Jenu dan pemerintah yang berwenang yaitu pihak pemerintah desa dan masing-masing pelaku pembangunan guna mencapai tujuan bersama yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pada kenyataannya masih kurang perhatian dan partisipasi masyarakat khususnya petani pada proses pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) di Desa Jenu perlu ditingkatkan dengan merawat dan menjaga kondisi infrastruktur demi tercapainya tingkat kesejahteraan rumah tangga masyarakat ke arah yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka. 1995. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Aminudin, Muhammad. 2007. *Evaluasi Rencana Lokasi Pemindahan Terminal Induk Km. 6 Banjarmasin*. (Tesis). Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada.
- Anisatul, Silvi. 2014. *Efektivitas Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman sebagai Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus pada Desa Tambakrejo Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Asariansyah, M. Faisal . 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*. Malang: Universitas Brawijaya
- Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial. 2005. *Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2005*. Jakarta
- BAPPENAS. 1997. *Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan: Kajian Bersaa Pengembangan Kebijakan*. Ringkasan Eksekutif.
- BPS Tuban. 2013. *Dokumen Perencanaan Sanitasi Pokja BP Kabupaten Tuban*. Online.
[http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.tuban/BPS-Tuban-BAB-II\(draf-ok\).docx](http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.tuban/BPS-Tuban-BAB-II(draf-ok).docx) diakses pada tanggal 7 Juni 2015.
- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. LP3ES: Jakarta.
- Depdiknas. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Grigg, Neil S. 1988. *Infrastructure Engineering ang Manajement*. New York: A Wiley-Interscience Publication.
- Handoko, T. Hani. 1984. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Indikator Kesejahteraan, diambil pada tanggal 13 April 2015.
<http://www.menkokesra.go.id/content/view/56>
- Johnston, R.J. (ed.). 1981. *The Dictionary of Human Geography*. Oxford: Basil Blackwell Publisher Limited.
- Kementrian Dalam Negeri. 2013. *Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat Daerah*. Online. <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/35->

pembangunan-infrastruktur-dan-sinergi-pusat-daerah diakses pada tanggal 7 Juni 2015.

- Khairuddin, H. 1992. *Pembangunan Masyarakat : Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Kuswara, Aditya Widya. 2012. *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi tentang Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Sosial Ekonomi yang Dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di desa Sumberbening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang)*. Malang: Universitas Brawijaya
- Mantra, Ida Bagoes. 2008. *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moloeng, Lexy J. 2005. *Metodologi Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya.
- Mosher, Arthur T. 1966. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta: Yasaguna.
- Rakhmat, Jalaludin. 1998. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sevilla, Consuelo G. et. al. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press.
- Siagian, Sondang P. 2010. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, Dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekartawi. 1994. *Pembangunan Pertanian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial, Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- _____. 1997. *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bima Rena Pariwisata.
- Supriatna. 2000. *Petunjuk Pelaksanaan Kecamatan: Development Program*. Jakarta: PT. Uni Sistem Utama.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Tim Penyusun Balai Desa Jenu. 2014. *Data Coastal Resilience Village*. Tuban: Penelitian Bersama UNDIIP.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Monografi Desa Jenu. 2014. *Monografi Desa / Kelurahan*. Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.

Tim Penyusun OMS Desa Jenu. 2013. *Laporan Akhir OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) Desa Jenu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban: Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP APBN)*. Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya.

Tim Penyusun RPJMD Desa Jenu. 2010. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Jenu Kecamatan Jenu Tahun 2010-2014*. Tuban: Tim Penyusun RPJMD Desa Jenu Kecamatan Jenu.

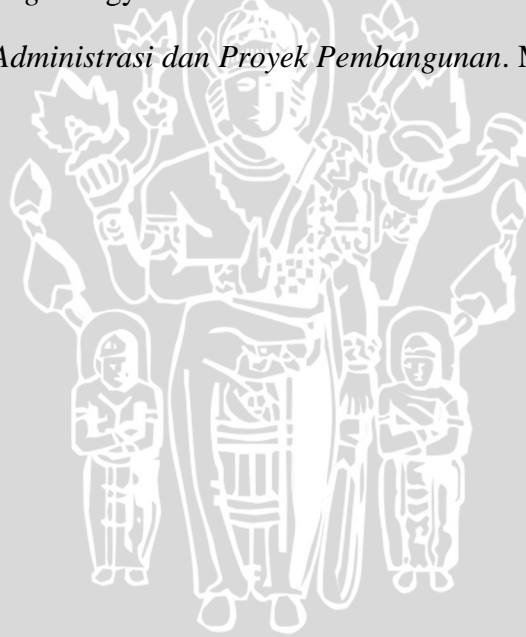
_____. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Jenu Kecamatan Jenu Tahun 2014-2018*. Tuban: Tim Penyusun RPJMD Desa Jenu Kecamatan Jenu

Tjokroamidjoyo, Bintoro. 1990. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: Majagung.

_____. 1994. *Pengantar Admisitrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.

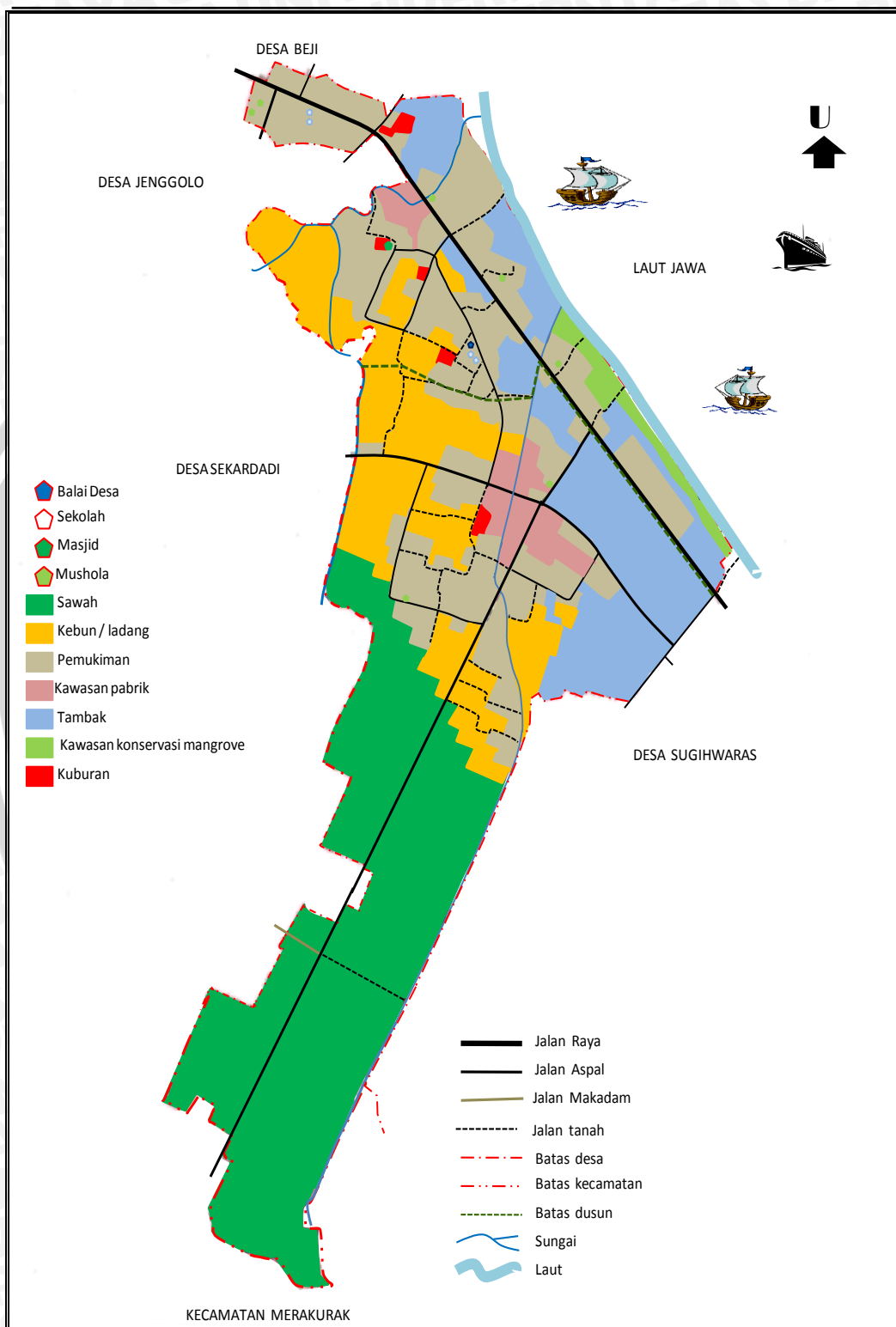
Tjokrowinoto, Moeljarto. 1995. *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacan.

Zauhar, Susilo. 1993. *Administrasi dan Proyek Pembangunan*. Malang: IKIP.



LAMPIRAN

PETA WILAYAH DESA JENU



1. Jawaban Responden Pada Saat Post Test Tentang Kesejahteraan Masyarakat Sebelum Adanya PPIP

Responden	Indikator Pertanyaan					
	1	2	3	4	5	6
1	2	2	2	3	2	2
2	2	3	3	3	2	3
3	2	2	2	3	2	2
4	2	2	2	3	2	2
5	2	2	2	3	2	2
6	2	2	2	3	1	2
7	2	2	1	3	2	3
8	2	2	2	3	2	1
9	2	2	2	2	1	2
10	2	2	2	3	2	1
11	2	2	2	3	1	2
12	2	3	3	3	2	3
13	2	3	3	3	2	2
14	3	3	3	3	2	3
15	2	2	2	3	2	2
16	2	3	3	3	2	3
17	2	3	3	3	1	3
18	2	2	2	3	2	2
19	2	3	3	3	1	3
20	2	2	2	2	2	2
21	2	2	2	3	2	1
22	2	2	2	3	3	3
23	2	2	2	3	2	2
24	2	2	2	3	2	2
25	2	2	1	3	2	2
26	2	2	2	3	2	2
27	2	3	3	3	2	2
28	3	2	1	3	2	1
29	2	3	3	3	3	2
30	3	2	2	3	1	2
31	3	2	1	3	3	2
32	3	3	3	3	3	3
33	2	2	2	3	3	1
34	3	2	2	3	3	2
35	2	3	3	3	3	3

36	2	2	2	3	3	2
37	2	3	3	3	2	3
Total	78	86	82	109	75	80
Rata-rata	2,11	2,32	2,21	2,94	2,02	2,16
Skor Maks	3	3	3	3	3	3
Persentase	70,27	77	72,87	98	67,33	72,07
Kategori	sedang	sedang	sedang	tinggi	sedang	Sedang

Total rata-rata :13,76 presentase : 76,26%

Total skor maks : 18 Kategori : sedang



2. Jawaban Responden Pada Saat Post Test Tentang Kesejahteraan Masyarakat Setelah Adanya PPIP

Responden	Indikator Pertanyaan					
	1	2	3	4	5	6
1	2	3	3	3	3	3
2	2	3	3	3	2	3
3	2	3	3	3	2	3
4	2	3	2	3	2	3
5	2	3	3	3	2	3
6	2	3	2	3	2	2
7	2	3	3	3	2	3
8	2	3	3	3	2	3
9	2	3	2	3	2	2
10	2	3	3	3	2	3
11	2	3	2	3	2	2
12	2	3	3	3	2	3
13	2	3	3	3	3	3
14	3	3	3	3	2	3
15	2	3	3	3	3	3
16	2	3	3	3	2	3
17	2	3	3	3	1	3
18	2	3	2	3	2	2
19	2	3	3	3	3	3
20	2	3	2	3	2	3
21	2	3	3	3	2	3
22	2	3	3	3	3	3
23	2	3	3	3	3	3
24	2	3	3	3	3	3
25	3	3	3	3	3	3
26	2	3	2	3	3	3
27	2	2	1	3	2	2
28	3	2	1	3	2	3
29	2	3	3	3	3	3
30	3	3	2	3	3	3
31	3	2	2	3	3	3
32	3	3	3	3	3	3
33	2	2	1	3	3	3
34	3	2	2	3	3	2
35	2	3	3	3	3	3

36	2	1	1	3	3	3
37	2	3	3	3	3	3
Total	81	103	93	111	75	105
Rata-rata	2,189	2,783	2,513	3	2,46	2,837
Skor Maks	3	3	3	3	3	3
Persentase	72,97	92,77	83,77	100	81,97	94,57
Kategori	sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Total rata-rata :15,78 presentase : 87,675%

Total skor maks : 18 Kategori : Tinggi



3. Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah keluarga miskin (KK)
1	KENDURUAN	3642
2	BANGILAN	4880
3	SENERI	5503
4	SINGGAHAN	5057
5	MONTONG	5287
6	PARENGAN	5457
7	SOKO	11046
8	RENGEL	6154
9	GRABANGAN	5616
10	PLUMPANG	10399
11	WIDANG	4589
12	PALANG	7614
13	SEMANDING	8509
14	TUBAN	4232
15	JENU	6005
16	MERAKURAK	6237
17	KEREK	6831
18	TAMBAKBOYO	4119
19	JATIROGO	4040
20	BANCAR	6903
	JUMLAH	122120

Sumber Kabupaten Tuban dalam Angka 2012

4. Jumlah Rumah per Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah
1	KENDURUAN	6954
2	BANGILAN	13621
3	SENERI	10228
4	SINGGAHAN	11306
5	MONTONG	12534
6	PARENGAN	11816
7	SOKO	20679
8	RENGEL	15912
9	GRABANGAN	10587
10	PLUMPANG	16562
11	WIDANG	12708
12	PALANG	19348
13	SEMANDING	23411
14	TUBAN	20552
15	JENU	11792
16	MERAKURAK	14062
17	KEREK	17197
18	TAMBAKBOYO	39148
19	JATIROGO	16321
20	BANCAR	14481
	JUMLAH	319219

Sumber Kabupaten Tuban Dalam Angka 2012

KUESIONER**PEDOMAN PERTANYAAN DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PIIP) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA JENU, KECAMATAN JENU, KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR****I. Data Identitas Responden**

- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Usia :
- d. Pendidikan akhir :

A. Pengukuran variabel Kesejahteraan Petani sebelum adanya Program Pengembangan Kecamatan**1. Pendapatan****a. Sumber Pendapatan**

Berasal dari manakah sumber pendapatan yang Anda peroleh sebelum program PPK? (pertanian dan luar pertanian/pertanian saja/luar pertanian saja)

Jawab:.....

.....

b. Jumlah Penerimaan Per Musim Tanam

Berapakah jumlah penerimaan yang dapat Anda peroleh dalam per bulan atau per musim panen sebelum program PPIP?

Jawab:.....

.....

c. Jumlah Penjualan

Berapakah jumlah penjualan hasil tani Anda sebelum program PPIP?

Jawab:.....

.....

2. Pendidikan

Sebelum program PPIP, apakah anak usia sekolah dalam keluarga bersekolah? (Semua anak usia sekolah bersekolah/Ada anak usia sekolah tidak bersekolah/Semua anak usia sekolah tidak bersekolah)

Jawab:.....

.....

3. Kesehatan

Sebelum program PPIP, Apa yang Anda lakukan jika ada anggota keluarga yang sakit? (pusat kesehatan/obat bebas/obat tradisional)

Jawab:.....

.....

.....

4. Air bersih dan sarana kesehatan (MCK)

Bagaimana keadaan air bersih dan MCK yang Anda miliki sebelum program PPIP? (milik sendiri/milik umum/tidak memiliki salah satunya)

Jawab:.....
.....
.....



B. Pengukuran variabel Kesejahteraan Petani setelah adanya Program Pengembangan Kecamatan

1. Pendapatan

a. Sumber Pendapatan

Berasal dari manakah sumber pendapatan yang Anda peroleh setelah program PPK? (pertanian dan luar pertanian/pertanian saja/luar pertanian saja)

Jawab:.....

b. Jumlah Penerimaan Per Musim Tanam

Berapakah jumlah penerimaan yang dapat Anda peroleh dalam per bulan atau per musim panen setelah program PPIP?

Jawab:.....

c. Jumlah Penjualan

Berapakah jumlah penjualan hasil tani Anda sebelum program PPIP?

Jawab:.....

2. Pendidikan

Sebelum program PPIP, apakah anak usia sekolah dalam keluarga bersekolah? (Semua anak usia sekolah bersekolah/Ada anak usia sekolah tidak bersekolah/Semua anak usia sekolah tidak bersekolah)

Jawab:.....

3. Kesehatan

Sebelum program PPIP, Apa yang Anda lakukan jika ada anggota keluarga yang sakit? (pusat kesehatan/obat bebas/obat tradisional)

Jawab:.....

4. Air bersih dan sarana kesehatan (MCK)

Bagaimana keadaan air bersih dan MCK yang Anda miliki sebelum program PPIP? (milik sendiri/milik umum/tidak memiliki salah satunya)

Jawab:.....

